

**URGENITAS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP  
LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU  
KABUPATEN GOWA**  
(Studi Kasus Tahun 2014-2018)



**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Peradilan pada  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**Oleh:**  
**MUNAWIR NURUM**  
**NIM : 10100114076**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munawir Nurum

Nim : 10100114076

Tempat/Tgl. Lahir : Gowa, 01 November 1996

Jurusan/Prodi : Peradilan Agama / Hukum Acara Perdata dan  
Kekeluargaan

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : **URGENITAS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI  
KECAMATAN TOMPBULU KABUPATEN GOWA**  
(Studi Kasus Tahun 2014-2018)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 11 Juli 2018

Penulis

Munawir Nurum

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "URGENITAS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)", yang disusun oleh Munawir Nurum, NIM: 10100114076, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 30 Juli 2018 M  
17 Dzulqaidah 1439H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Sekretaris : Dr. H. Supardi, M.H.I.

Munaqisy I : Dra. Hj. Hartini, M.H.I.

Munaqisy II : Subchan Khalik, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing I : Dr. H. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 196210161990031003



## KATA PENGANTAR



Segala Puji syukur Alhamdulillah selalu dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dialah sebaik-baik pencipta hukum, hakim maha adil, maha bijak dan maha segalanya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan sebagian tugas akademik sebagai syarat menempuh jenjang Sarjana S1 ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, pemimpin orang-orang yang bertaqwa, dan penempuh jalan kebenaran, Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa *istiqomah* dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam.

Dalam skripsi yang berjudul “Urgenitas Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Legalitas Tanah Wakaf di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa” dapat diselesaikan. Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala rasa hormat pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibu yang saya sayangi. Ayahanda H. Umar, S.Ag dan Ibu Dra. Hj. Nurhayati, Terima kasih penulis ucapkan kepada beliau semua yang telah membimbing, mencintai, memberi semangat, harapan, arahan dan motivasi serta memberikan dukungan baik secara materii maupun spiritual.

2. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Dr. H. Supardin M.H.I selaku ketua jurusan Peradilan Agama dan Dr. Patimah M.Ag selaku sekretaris jurusan Peradilan Agama.
5. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Dr. Hj. Patimah, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu demi memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I selaku Dosen Penguji I dan Bapak Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan saran atau masukan dalam penyelesaian skripsi ini
7. Seluruh dosen jurusan Peradilan Agama fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama berada dibangku kuliah.
8. Segenap karyawan dan karyawanati fakultas Syariah dan Hukum yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Kepada seluruh element masyarakat yang ada di kemamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang telah memberikan informasi terkait Penelitian ini.
10. Semua teman-teman pada Peradilan Agama, khususnya Peradilan Agama 2014 yang telah membantu selama perkuliahan sampai sekarang ini, serta teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2014 yang telah membantu, dan memberikan semangat.

11. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2014 terkhusus Peradilan Agama B (3/4) telah memotivasi dan membantu penulis untuk segera menyelesaikan studi serta dukungan dan canda tawa yang menyisakan kesan yang mendalam di hati.
12. Teman-teman KKN Reguler angkatan 57 terkhusus teman posko KKN Desa Pangalloang kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba yang telah bersama-sama selama 2 bulan lamanya berbakti pada Masyarakat.
13. Seluruh pihak yang tak sedikit banyak berkontribusi atas penyelesaian penelitian dan skripsi ini yang tidak mampu disebutkan satu-persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon, dan penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah, semoga tulisan sederhana ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kita, sehingga kita menjadi umat yang berilmu dan dimuliakan oleh Allah Swt, Amin.

Makassar, 11 Juli 2018

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

MUNAWIR NURUM  
NIM: 10100114076

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vxi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-14</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Tujuan dan Kegunaan .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>15-33</b>
A. Kesadaran Hukum .....	15
B. Perwakafan .....	22
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35-43</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber data .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Instrument Penelitian .....	38
F. Teknik Pengelolaan Analisis Data .....	39
G. Keabsahan Data .....	40

<b>BAB IV : ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF .....</b>	<b>44-63</b>
A. Gamabaran Umum Tentang Perwakafan di KecamatanTompobulu Kabupaten Gowa .....	44
B. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pengurusan Legalitas Tanah wakaf di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.....	48
C. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Masyarakat terhadap pengurusan legalitas Tanah wakaf di Kecamatan Tompobulu.....	59
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>64-66</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Implikasi Penelitian.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Bc
ت	Ta	T	Tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	S	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	Y	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ئَ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
ئِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
ئُ	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### 4. *Tā' marbū'ah*

Transliterasi untuk tā' marbū'ah ada dua, yaitu: tā' marbū'ah yang hidup Ta'marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". ta'marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*  
 الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*  
 نَجِّنَا : *najjainah*

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-biladu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أَمِرْتُ : *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

شَيْءٌ : *syai'un*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

*Fil Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللَّهُمَّ *Dinullah billah* دِينَ اللّٰهُ

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمَّ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah* فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

### 10. *Huruf Kapital*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an*

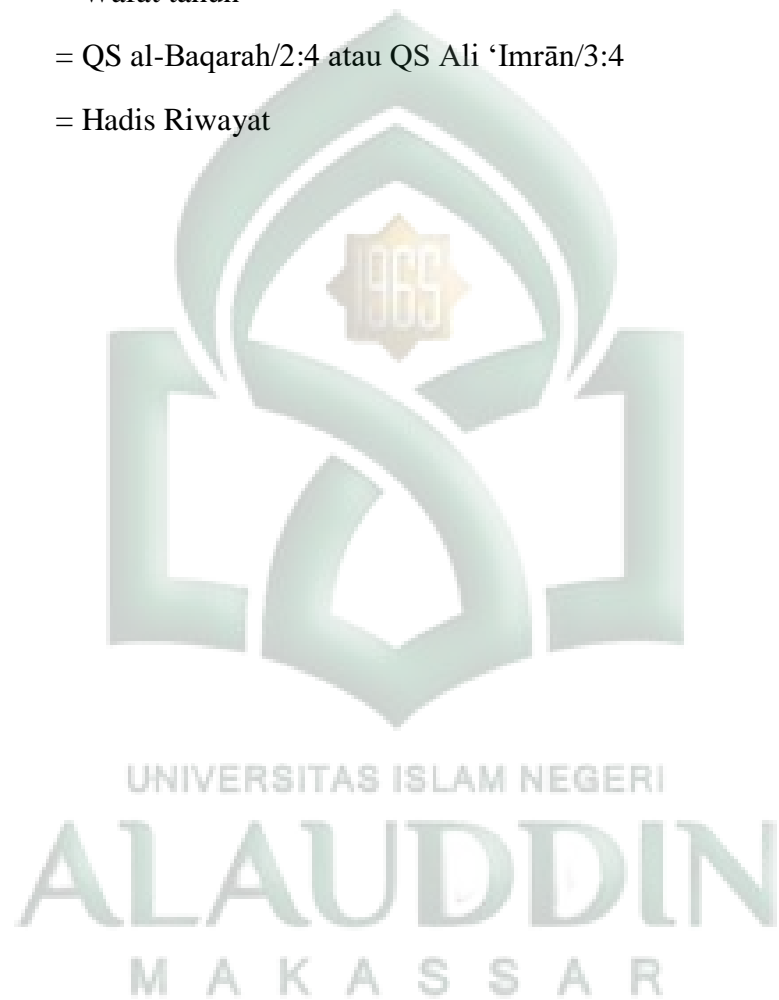
*Wa ma Muhammadun illa rasul*

### B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
Saw.	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat



## ABSTRAK

**Nama : Munawir Nurum**  
**NIM : 10100114076**  
**Judul : URGENITAS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOLU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)**

---

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pengurusan legalitas tanah wakaf dikecamatan Tompolu kabupaten Gowa. 2) apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap pengurusan legalitas Tanah wakaf di kecamatan Tompolu kabupaten Gowa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggali secara mendalam masalah kesadaran hukum masyarakat terkait pengurusan legalitas tanah wakaf, termasuk faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. sehingga dapat menarik kesimpulan terkait bagaimana pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat terkait pengurusan legalitas tanah wakaf.

Penelitian ini berlokasi di kecamatan Tompolu Kabupaten Gowa karena berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompolu dalam waktu tahun 2014-2018 hanya ada satu lokasi yang terdaftar sebagai tanah wakaf padahal kenyataan di lapangan masih banyak tanah wakaf berupa masjid, sekolah/madrasah, pemakaman dan tempat umum lainnya yang belum di daftarkan di KUA kecamatan Tompolu Kabupaten Gowa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *Field Research*, dengan menggunakan metode kualitatif lapangan, yaitu metode yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya. Metode ini sesuai untuk meneliti kesadaran hukum masyarakat terhadap pengurusan legalitas tanah wakaf secara mendalam. Dengan memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berwafaf dan Tokoh Masyarakat yang dianggap mengetahui perwakafan di Tompolu Kabupaten Gowa. Adapun sumber data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Berdasarkan data yang ada kesadaran hukum masyarakat di kecamatan Tompolu Kabupaten Gowa terkait pengurusan Legalitas Tanah wakaf masih tergolong rendah. 2) Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu: faktor pengetahuan dan pemahaman hukum, faktor kurangnya sosialisasi hukum, waktu pengurusan wakaf dan prinsip saling percaya antar masyarakat.

Implikasi penelitian : 1) pemerintah harus lebih aktif untuk melakukan sosialisasi tentang perwakafan dengan memberdayakan penyuluh Agama yang ditempatkan di setiap desa atau kelurahan. 2) masyarakat harus berinisiatif menggali informasi dengan menggunakan fasilitas yang ada seperti teknologi informasi sehingga dapat memahami praktek perwakafan serta harus ada sinergitas antara semua elemen masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap perwakafan.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Islam diyakini sebagai Agama yang bersifat Universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan Al-qur'an sendiri menyatakan bahwa ajaran Islam berlaku dan diperuntukkan untuk kepentingan untuk kepentingan dan kebahagiaan seluruh manusia dan alam raya.<sup>1</sup> Langit dan Bumi yang diciptakan oleh Allah swt. Untuk manusia sebagai amanat kepada Manusia di muka Bumi, di mana salah satu bagian dari bumi itu adalah tanah yang mempunyai hubungan erat dengan manusia baik itu selama masa hidupnya sampai meninggalpun hidup manusia mempunyai hubungan dengan tanah. Berdasarkan fakta tersebut, antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya itu terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan ini mempunyai sumber serta yang bersifat *religio magis*.<sup>2</sup>

Para filosof khususnya Aristoteles menjuluki manusia sebagai *zoon politicon*, yaitu sebagai makhluk yang berdasarkan selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul.<sup>3</sup> oleh karena itu hubungan manusia, baik itu manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial mempunyai hubungan yang erat atau hubungan yang abadi dengan segala apa yang ada di muka bumi baik itu tanah, air, udara dan ruang angkasa itu merupakan aspek yang sangat penting dan

---

<sup>1</sup> Kesimpulan ini berangkat dari pemahaman dan keyakinan akan keuniversalan ajaran agama islam sebagaimana termaktub dalam Q.S Saba (34) ayat 28 dan Q.s Al-Anbiya (21) ayat 107

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.1.

<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.1.

dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang mana tanah selalu menjadi kebutuhan dalam hidupnya, baik digunakan sebagai lahan pertanian, tempat ibadah, madrasah atau sekolah, atau bahkan digunakan sebagai tempat tinggal. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah akan menjadi pusat perhatian dalam kehidupan Manusia sehari-hari. Untuk sebagian besar ataupun seluruh Manusia di muka bumi ini tanah merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung kehidupannya, apalagi bagi orang yang tinggal di pedesaan yang kehidupan sehari-harinya mayoritas adalah bertani, berkebun, ataupun berladang, yang dimana tanah merupakan aspek terpenting dalam kehidupan mereka.

Masalah kesadaran hukum merupakan masalah klasik yang terjadi dalam Masyarakat, utamanya di Indonesia sendiri, kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting untuk diperhatikan dimana kesadaran hukum itu sendiri menyangkut bagaimana hukum itu harus diterapkan oleh sebagian atau seluruh masyarakat sesuai dengan peraturan atau norma-norma yang berlaku ditengah masyarakat itu sendiri, atau dengan kata lain adalah bagaimana pemahaman Masyarakat tentang penerapan hukum yang seharusnya dilakukan.

Sebagai salah satu contoh yang terjadi ditengah masyarakat adalah masalah persertifikatan tanah, rata-rata orang kurang faham masalah persertifikatan tanah, di sisi lain tanah merupakan tempat mereka baik itu membangun rumah, bertani, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sumber hidup manusia selalu berkaitan dengan tanah, maka maka dianggap manusia masih memiliki kesadaran hukum yang masih rendah Karena belum memahami atau belum mengerti terhadap system atau penerapan hukum yang berlaku ditengah-tengah mereka.

Dalam pelaksanaannya ada aspek yang perlu diperhatikan menyangkut efektifitas hukum dalam masyarakat yaitu berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan hukum oleh Masyarakat itu sendiri, harapannya untuk melihat hukum itu akan menjadi berwibawah. Sebelum adanya proses penegakan hukum yang baik, pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warganya memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukumnya sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap juga tidak tinggi<sup>4</sup>.

Sebagai warga Indonesia seseorang dituntut dalam melakukan sesuatu itu sesuai dengan aturan-aturan atau hukum yang ada di Indonesia. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) UUPA untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah di adakan pendaftaran tanah diseluru wilayah di Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.<sup>5</sup> Karena masalah tanah merupakan masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat sehingga sering menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Oleh karena itu dengan adanya pendaftaran tanah diharapkan untuk mengurangi atau menghindari potensi terjadinya sengketa. Karena dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status dan

---

<sup>4</sup>Peragin Efendi, *Hukum Agraria Indonesia. Suatu Telaan dari Sudut Pandang Praktisi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h.95.

<sup>5</sup> Kutipan yang diambil dari UU RI No. 5 Tahun 1960 pada pasal 19 ayat (1) mengenai kepastian hukum oleh pemerintah terhadap pendaftaran tanah oleh masyarakat.

kedudukan pada tanah tersebut yang dihadapinya, letak, luas, dan batas-batasnya siapayang mempunyai dan beban-beban apa yang ada diatasnya.<sup>6</sup>

Masalah pertanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, gagasan ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam UUD 1945 yang mana dipergunakan untuk kesejahteraan Rakyat. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Amandemen berbunyi: "Bumi, Air, dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".<sup>7</sup>

Selaras dengan bunyi pasal 33 UUD 1945 selanjudnya dianut dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang pengaturan Pokok dasar Agrariah atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Pokok Agrariah (UUPA) serta peraturan peraturan lainnya.

Mengenai pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan umum, tanah merupakan aspek yang sangat penting didalamnya dan dapat di pergunakan untuk kepentingan umum masyarakat, dalam hal ini salah satunya masalah Wakaf. Masalah perwakafan bukanlah hal yang baru bagi warga Indonesia, praktik wakaf sering terjadi di tengah masyarakat, hal ini dianggap wajar karena bangsa Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam.

Oleh karena itu secara Kwantitas bangsa Indonesia yang merupakan mayoriyas Bergama Islam di sisi lain melahirkan dualisme hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun realitasnya bangsa Indonesia menganut hukum positif yang

---

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agrariah dalam Pembangunan Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), h.123.

<sup>7</sup> isi dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Amandemennya menyangkut tanah, air dan kekayaan alam lainnya di pergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

berlaku, akan tetapi di sisi lain bangsa ini membutuhkan tuntunan dari hukum Islam karena perkembangan hukum yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia itu mengacu pada nilai-nilai ajaran syariat Islam yang di sesuaikan dengan budaya dan tradisi bangsa Indonesia sehingga faktor inilah yang menimbulkan terjadinya penyelarasan hukum antaran dualisme hukum yang terjadi di Indoseia salah satunya dalam masalah perwakafan.

Di dalam perwakafan ada dua aspek yang saling berkaita yaitu masalah perwakafan tanah yang juga ada kaitannya dengan aspek keagamaan sehingga dalam syariat islam wakaf terbagi menjadi dimensi: *pertama* dari segi Aspek Religius bahwa wakaf adalah sesuatu yang di perbolehkan dalam syariat Islam sehingga dianggap perlu dipraktekkan oleh umat Islam sebagai tanda ketaatan kepada Allah swt, sehingga bernilai pahala dari Allah swt. nantinya. *Kedua* dari dimensi sosial bahwa wakaf merupakan salah satu wadah pengaplikasian manusia sebagai makhluk sosial, saling membantu dalam hal demi tercapainya kepentingan bersama sehingga akan menimbulkan rasa persaudaraan yang tinggi dalam masyarakat itu sendiri.

Wakaf adalah merupaka suatu perbuatan hukum yang bersifat rangkap, karena perbuatan itu disuatu pihak adalah perbuatan mengenai tanah atau benda lain yang menyebabkan objek itu mendapat kedudukan hukum yang bersifat khusus, tetapi di lain pihak bersamaan dengan itu perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan dalam hukum adat, yaitu suatu badan hukum yang ikut serta dalam pergaulan hukum sebagai objek hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dikutip dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang wakaf

Dalam Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat

(1) pengertian wakaf adalah :

“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan menurut syariat”.<sup>9</sup>

Begitu pentingnya masalah perwakafan dalam UUPA di atur secara Khusus ketentuan mengenai masalah perwakafan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya , ketentuan dalam pasal 49 UUPA menentukan sebagai berikut:

1. Hak milik tanah badan keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi, badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dapat diberikan tanah dikuasai langsung oleh Negara dan diberikan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>10</sup>

Meskipun perarutan tanah wakaf diatur oleh Undang-Undang RI No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria akan tetapi sebenarnya masalah perwakafan telah di atur dalam Islam. Dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia ada beberapa pedoman tentang pelaksanaan perwakafan di Indonesia seperti PP No. 28 Tahun 1977 dan peraturan lainnya tentang masalah yang menyangkut dalam bidang perwakafan.

---

<sup>9</sup> Suroso dan Nagami, *Tinjauan Yuridis Perwakafan Tanah Milik* (Yogyakarta: Liberty, 1984), h.17.

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* (Cet.VIII; Jakarta:Sinar Grafika, 2017), h.105.

Karena perwakafan tanah milik objeknya tanah, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal perlindungan tanah wakaf maka dibutuhkan suatu aturan guna untuk melindungi kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut.<sup>11</sup> oleh karena itu pemerintah menetapkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah milik dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan.
2. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini mengatur tentang perwakafan tanah milik selain belum memenuhi kebutuhan cara-cara perwakafan juga menimbulkan kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan adanya data-data yang nyata tentang wakaf.<sup>12</sup>

Perwakafan tanah adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan hukum yang mana tanah dikeluarkan bukan termasuk praktik jual beli ataupun di perdagangan dengan catatan bahwa tanah tersebut di gunakan dan di pergunakan sesuai tujuan dari wakaf tersebut, sehingga tanah yang mulanya sebagai objek hukum maka akan menjadi subjek hukum setelah tanah itu diwakafkan.

Akan tetapi sering terjadi kesalah fahaman dalam masyarakat mengenai praktik perwakafan, sebagian masyarakat sering menafsirkan bahwa wakaf itu hanya diperbolehkan hanya untuk semata-mata tujuan untuk peribadatan

---

<sup>11</sup> Kesimpulan ini beranjak dari bunyi pasal 49 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1950 tentang pokok-pokok Agraria yang berbunyi “Perwakafan tanah dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.

<sup>12</sup> Suroso dan Nagami, *Tinjauan Yuridis Perwakafan Tanah Milik* (Yogyakarta: Liberty, 2001), h.22.

misalnya pembangunan masjid, lahan untuk perkuburan atau pesantren saja, ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum ditengah masyarakat sehingga menimbulkan pemahamannya juga akan terbatas terhadap suatu permasalahan hukum, padahal berbicara masalah wakaf, berarti orang bisa mewakafkan tanahnya bukan hanya sebatas kepentingan tersebut tetapi juga untuk berbagai tujuan demi kepentingan umum dengan ketentuan tidak menyalahi dari syariat Islam.

Menyangkut kesadaran hukum terhadap tanah wakaf di Indonesia banyak sekali peristiwa tanah wakaf yang bahkan dijadikan sebagai milik pribadi, itu dikarenakan tanah tersebut belum pernah didaftarkan sesuai pertaturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh seperti dikecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ada sejumlah tanah wakaf yang sudah terdaftar dan ada juga tanah wakaf yang belum terdaftar sebagai sampel awal di Desa Tanete dan kelurahan Malakaji, Menurut Bapak Abdul Muthalib, S.Sos. Kepala desa Tanete ada banyak tanah wakaf yang diwakafkan secara langsung dan tanpa melalui pendaftaran di kantor KUA terlebih dahulu untuk menerbitkan akta Ikrar Wakaf. Lebih lanjut lagi menurut bapak Syarif, S.Pd salah seorang warga Dusun Ulugalung desa Tanete terdapat tanah yang diatasnya berdiri sekolah yang sebagian dari tanah tersenut dulunya adalah bangunan masjid akan tetapi setelah masjid itu dipindahkan tanah wakaf tersebut diklaim oleh ahli waris dari wakif. Kemudian menurut bapak Mushadi, S.Ag., M.HI di kelurahan Malakaji yang merupakan ibu kota dari kecamatan Tompobulu beberapa bidan tanah wakaf yang belum belum terdaftar dan belum terbit Akta Ikrar Wakafnya. Meskipun



sampai saat ini belum pernah terjadi sengketa, baik antara perorangan ataupun dalam lembaga atau kelompok. Akan tetapi kedepannya tidak menutup kemungkinan hal akan terjadi, karena tidak adanya legalitas atas tanah milik yang berarti tidak adanya landasan secara yuridis untuk menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut. Sehingga dapat di simpulkan bahwa semuanya ini tergantung bagaimana kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Jadi beranjak dari masalah dari pembahasan di atas maka penulis tergerak untuk mengadakan penelitian dengan judul: “URGENITAS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018).”

### ***B. Fokus Penelitian dan Dekskripsi Fokus***

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi kerancuan dalam hal menghindari kesalah fahaman dari pokok permasalahan yang akan diteliti maka penulis membatasi permasalahan kedalam focus penelitian dan akan dirincikan kedalam deksripsi fokus sehingga tidak menjadi begitu luas.

#### **1. Fokus Penelitian**

Agar penelitian lebih terarah sehingga lebih jelas dalam menganalisis permasalahan akan di teliti, Penulis dalam menyusun skripsi ini membagi dua fokus penelitian yaitu terkait, *Urgenitas kesadaran hukum masyarakat* dan *legalitas perwakafan tanah wakaf*.

## 2. Deskripsi Fokus

Adapun deksripsi fokus dalam penelitian ini, sebagai penjelasan terperinci dari fokus masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Urgenitas Kesadaran hukum Masyarakat artinya berkaitan masalah bagaimana masyarakat memahami dan mengaplikasikan hukum dalam kehidupannya sehari-hari. dalam hal ini merupakan Jumlah terbanyak dari kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu. Artinya kesadaran hukum yang lahir ditegah masyarakat berkaitan dengan bagaimana pengetahuan terhadap norma-norma dan nilai-nilai serta aturan yang ada pada masyarakat itu sendiri.
- b. Legalitas tanah wakaf: berkaitan tentang keabsahan untuk menunjukkan keterangan (penyataan) bahwa tanah yang diserahkan oleh seseorang untuk kepentingan umum khususnya untuk kegiatan peribadatan sebagai tanah wakaf dari orang yang berwenang dan dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan misalnya sertifikat tanah wakaf.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, berkaitan dengan hal tersebut pokok masalah yang harus dibahas adalah “Bagaimana Urgenitas Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Legalitas Tanah Wakaf?” yang dirangkai dalam submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya legalitas tanah wakaf?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Masyarakat terhadap legalitas tanah wakaf?

#### ***D. Kajian Pustaka***

Untuk lebih validnya sebuah karya tulis ilmiah, maka perlu rujukan atau sumber tulisan yang menopang dalam penulisan skripsi ini. Maka perlu dijelaskan beberapa rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

Setelah menelusuri beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah buku. Maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti yaitu :

*Pertama*, buku yang ditulis oleh Rachmadi Usman, S.H., M.H. yang berjudul “Hukum Perwakafan di Indonesia”, 2013. Buku ini menjelaskan tentang masalah pokok dalam praktik perwakafan khususnya praktik perwakafan di Indonesia dengan menyelaraskan dengan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

*Kedua*, buku yang ditulis oleh Dr. Rozalinda, M.Ag. yang berjudul “Menajemen Wakaf Produktif”, 2016. Buku ini memberikan arahan dan panduan tentang pengelolaan harta wakaf produktif, yang mana buku ini menggambarkan kondisi riil perwakafan di Indonesia, mulai dari pencatatan dan pendaftaran tanah, nazir wakaf dan lainnya yang menyangkut seputar permasalahan perwakafan di masyarakat Indonesia pada khususnya.

*Ketiga*, buku yang ditulis oleh Prof. Soerjono Soekanto dengan judul “Pokok-pokok Sosiologi Hukum” 1980. Buku ini menjelaskan tentang pola

perilaku hukum masyarakat hukum di Indonesia, termasuk dengan masalah yang berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat dan segala aspeknya.

*Keempat*, sebuah buku dari Adrian Sutedi, S.H. M.H., yang berjudul “Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya” 2007, buku ini mengurai masalah yang berkaitan dengan perwakafan mulai dari perwakafan dalam perspektif hukum agraria yang termasuk didalamnya aturan-aturan pendaftaran tanah, pejabat pendaftaran tanah sampai kepada tata cara pendaftaran tanah wakaf.

Setelah mengkaji dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang perwakafan, baik yang dicantumkan dalam kajian pustaka yaitu buku yang ditulis Rahmadi Usman, S.H., M.H hanya menyinggung hal-hal berkaitan dengan masalah pokok perwakafan dan prakteknya, kemudian buku yang ditulis oleh Rozalinda memberikan gambaran atau kondisi riil dari perwakafan di Indonesia, buku yang ditulis Soerjono Soekanto itu hanya memberikan gambaran pola perilaku masyarakat, dan kemudian terakhir buku Adrian Sutedi, S.H. M.H. itu memberikan penjelasan tentang peralihan hak atas tanah. Jadi setelah mengkaji beberapa karya tulis baik berupa buku, tulisan, dan skripsi, sejauh ini penulis belum menemukan pembahasan yang secara spesifik membahas mengenai urgensi Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap legalitas tanah Wakaf. Sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut.

### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Dalam suatu penelitian haruslah mempunyai suatu tujuan penelitian Tujuan ini tidak lepas dari pokok permasalahan diatas, ada dua tujuan penelitian yang harus dihadapi yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif
  - a. Untuk mengetahui kesadaran Masyarakat terhadap legalitas Tanah wakaf untuk menghindari adanya sengketa.
  - b. untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas tanah wakaf.
2. Tujuan subyektif
  - a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai hasil penelitian untuk menjawab permasalahan dalam menyusun suatu penulisan dan penelitian hukum.
  - b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis terhadap perkembangan hukum.

Dalam suatu penelitian, terdapat suatu manfaat penelitian. Selain bermanfaat bagi penulis, diharapkan juga bisa bermanfaat bagi semua pihak dan tentunya mempunyai manfaat yang dianggap positif. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. *Secara teoritis*

- a. Menghasilkan suatu penjelasan tentang pentingnya kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas Tanah wakaf sebagai upaya untuk menghindari sengketa.
- b. untuk pengembangan kelimuan dan pengetahuan dalam bidang perwakafan
- c. untuk tambahan penelitian dalam bidang Perwakafan yang sampai saat ini, sejauh penelesuran penulis masih tergolong kurang.

2. *Secara praktis*

Secara Praktis tentu harapan semua manusia bahwa hukum tidak hanya berada pada tataran teoritis saja, melainkan harus berefek positif pada mereka dengan cara Mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan bagi penulis maupun orang lain dalam menyusun suatu penulisan hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Kesadaran Hukum***

Kesadaran hukum yaitu kesadaran dari subjek hukum secara keseluruhan.<sup>13</sup> Yang dimana kesadaran hukum muncul dalam rangka mencari dasar sah nya suatu hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi abstrak di dalam diri Manusia tentang keserasian antara ketertiban yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

Oleh karena itu tinjauan kesadaran hukum berkaitan dengan definisi dari kesadaran hukum, indikator-indikator kesadaran hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum.

##### **1. Pengertian Kesadaran Hukum**

Kesadaran berasal dari kata sadar yang mendapat awalan ke dan akhiran an yang artinya insaf, merasa, tahu, dan mengerti.<sup>14</sup>

Sedangkan kata Menurut KBBI Hukum berarti 1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintah; 2. Undang-undang, peraturan dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; 4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> M. Syamsuddin, *Konstitusi Baru Budaya Hukum Hakim* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.34.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (Departemen Pendidikan Nasional), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-III (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.1192

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (Departemen Pendidikan Nasional), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 413

Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Prancis, *Reacht* dalam Bahasa Jerman *Reacht* dalam bahasa Belanda atau *dirito* dalam bahasa Italia.<sup>16</sup>

menurut Hans Kelsen “*Law is coercive order of human behavior .. it is the primary norm which stipulates the sanction*” (hukum adalah suatu perintah – memaksa terhadap tingkah laku manusia.. hukum adalah kaedah primer yang menetapkan sanksi-sanksi).<sup>17</sup>

Dalam pandangan Utrecht hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat).

Hukum pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan kaidah atau norma yang harus di akui oleh masyarakat baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis dan jika dilanggar oleh individu ataupun kelompok Masyarakat itu sendiri maka akan dikenakan sanksi.

Dengan kata lain, hukum mengatur antara orang yang satu dan orang yang lainnya, antar orang dengan Masyarakat atau antara Masyarakat yang satu dengan Masyarakat yang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban.<sup>18</sup>

Oleh karena itu Soerjono Soekanto mengatakan kesadaran hukum itu adalah sebagai berikut. ”kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak

---

<sup>16</sup> Dudu Muswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung:Rafika Aditama 2003), h.7.

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum* (Cet I; Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1990), h. 18.

<sup>18</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta:Mitra Wacana Media 2014), h.13.



timbul. Akan tetapi, tentang asas kesadaran hukum itu, terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan”.<sup>19</sup>

Mertokusumo mengemukakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap Manusia tentang apa hukum itu atau apa sebenarnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan tentang membedakan antara hukum dan tidak hukum(*onrecht*).<sup>20</sup> Kesadaran hukum baru persoalan baru dipersoalkan atau ramai dibicarakan ketika kesadaran hukum itu merosot atau tidak ada, atau terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum makin tinggi kesadaran hukum seseorang, maka semakin tinggi ketaatan hukumnya.

Dengan demikian kesadaran hukum merupakan hasil dari serangkaian proses hubungan yang saling berkaitan diantara tiga unsur yaitu: pengetahuan terhadap hukum, pengetahuan tentang fungsi hukum serta ketaatan terhadap hukum, yang dimana ketiga unsur tersebut saling berkaitan antara satu sama lain. Orang harus mengetahui hukum, kemudian diharapkan memahami hukum tersebut dan akhirnya akan menaati dan mematuhi hukum itu.

## **2. Indikator-indikator Kesadaran Hukum**

Masalah kesadaran hukum sering diasumsikan bahwa kesadaran hukum sangat erat kaitannya dengan ketaatan hukum, akan tetapi kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat belum menjamin untuk tunduk ataupun menaati perundang-undangan yang berlaku di Masyarakat itu sendiri.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi hukum dan Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali, 1980), h. 94.

<sup>20</sup> Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Menajemen Publik* (Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h.301.

Kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu.<sup>21</sup> Kesadaran hukum juga berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat, Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Indicator-indikator kesadaran hukum terbagi atas 4 bagian adalah sebagai berikut: (i) Pengetahuan orang-orang tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*); (ii) pengetahuan seseorang tentang peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*); (iii) sikap orang terhadap peraturan-peraturan hukum (*law attitude*); (iv) pola perilaku hukum (*law behavior*).<sup>22</sup>

#### a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan (*knowlige*) adalah segala sesuatu yang kita ketahui.<sup>23</sup> Misalnya suatu peraturan perundang undangan telah di undangkan dan telah di terbitkan menurut prosedur yang benar, maka secara yuridis peraturan perundangan ini berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat di anggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, misalnya Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun, asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya. Pengetahuan hukum masyarakat akan diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pakok-pokok Sosiologi Hukum*, Edis ke-I (Cet.XXII; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.167.

<sup>22</sup> M. Syamsuddin, *Konstitusi Baru Budaya Hukum Hakim*, Edisi II, h.34.

<sup>23</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watani Marpuang, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), h.20

## b. Pemahaman Hukum

Apabila Pengetahuan hukum saja yang di miliki masyarakat, hal itu belum cukup memadai, masih perlu pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat memahami tujuan peraturan perundang undangan dan manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang undangan dimaksud. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya yang diatur oleh peraturan perundang undangan dimaksud.<sup>24</sup>

## c. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

## d. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Cet.VI; Palu:Sinar Grafika, 2010), h.67.

dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Jadi untuk mengetahui sekaligus mengukur tingkat kesadaran hukum Masyarakat yang mengindikasikan pula tingkat kebudayaan hukum masyarakat melalui keempat indikator kesadaran hukum tersebut.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum**

Problematika yang ada dalam masyarakat berkaitan langsung dengan kesadaran hukum yang ada ditengah masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum dianggap sebagai mediator antara perilaku manusia dengan hukum baik secara individu maupun secara berkelompok dalam Masyarakat itu sendiri dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi antara hukum dan perilaku Manusia dalam Masyarakat.

Ada berbagai hal yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran hukum dalam kehidupan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan yang terjadi dalam berbagai sector kehidupan masyarakat seperti sector ekonomi, administrasi, politik, kelembagaan kepemimpinan desa, pendidikan, keluargadan lain sebagainya yang telah menimbulkan kegoncangan dalam nilai-nilai kehidupan. Pada masa seperti itu norma lama telah ditinggalkan tanpa ada kesepakatan.
- b. Masyarakat Indonesia sedang berkembang wujudnya sebagai system social yang sederhana, homogen dan terdiri dari beberapa satuan etnis yang terpecah-pecah kewujudannya yang baru. Namun proses perwujudan masyarakat nasional tunggal ini tidak segera diikuti adanya system hukum nasional pula, sehingga warga masyarakat telah melupakan anggota suatu ikatan kesatuan bangsa yang hidup dalam suasana kehidupan hukum yang beraneka ragam.

- c. Jangkauan hukum yang tidak merata, tidak dikomunikasikannya hukum kepada masyarakat secara luas dan efektif, penegakan hukum yang tidak konsisten, fungsi hukum yang sering gagal sebagai pengayom atau penegak keadilan sehingga hukum kehilangan kekuasaan dan kewibawaannya
- d. Kuatnya sifat pentralisme dalam kehidupan masyarakat tidak didukung pemberian contoh teladan dari pemimpin formal maupun non formal mempunyai pengaruh terhadap perkembangan kesadaran hukum masyarakat. Hingga kini manipulasi dan korupsi didalam dan instansi agraria masih banyak dan sering pula diberitakan didalam beberapa media massa, sehingga masyarakat luas mengetahuinya.<sup>25</sup>

Tetapi ada situasi dimana masyarakat sudah sadar aturan hukum, dimana norma hukum akan dihargai oleh masyarakat apabila ia telah memahami dan menaatinya, artinya dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum itu benar-benar menghasilkan ketertiban serta kentruman di antara masyarakat itu sendiri.

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu.<sup>26</sup> Misalnya peraturan tertentu seperti undang-undang tentang perwakafan serta aturan lainnya, peraturan tersebut dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum terkait dengan pasal-pasal tertentu dari suatu perundang-undngan, agar

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta CV Rajawali, 1982), h.145.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Cet.VI; Palu:Sinar Grafika, 2010), h.69.

masyarakat akan memahami hukum tersebut dan sadar akan hukum agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Kesadaran hukum dan takutnya masyarakat pada hukum tidak bisa dipisahkan secara tegas. Berarti bila Masyarakat sadar akan peran dan fungsi hukum, tentunya mereka akan menaatise segala larangan dan perintahnya. Salah satu cara pembentukan kesadaran hukum masyarakat adalah bagaimana hukum disebarluaskan atau di komunikasikan kepada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat mengerti, memahami, dan melaksanakan apa yang dikehendaki aturan hukum tersebut.

## **B. Perwakafan**

### **1. Pengertian Wakaf**

Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa* (*fiil madhi*), *yafiqu* (*fiil mudhari*) dan *Waqafan* (*isim masdhar*) yang secara etimologi (*lught*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan.<sup>27</sup>

Dalam peristilahan *syara'* wakaf adalah sejenis pemberian sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum<sup>28</sup>

Wakaf sebagai institusi keagamaan, di samping berfungsi '*budiyah* juga berfungsi sosial.<sup>29</sup> Dalam pengertiannya, wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat rangkap, karena perbuatan itu di suatu pihak adalah perbuatan mengenai tanah (atau benda lain) yang menyebabkan obyek itu

---

<sup>27</sup> Suhardi K. Lubis, *wakaf & Pemberdayaan Umat* (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.3.

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), h.635.

<sup>29</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontenporer* (Cet.III; Jakarta: kencana, 2010) h.409.

mendapat kedudukan hukum yang bersifat khusus, tetapi di lain pihak bersamaan dengan itu perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan dalam hukum adat, yaitu suatu badan hukum yang dapat ikut serta dalam pergaulan hukum sebagai objek hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, pada pasal 1 ayat (1) Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”<sup>30</sup>

Salanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengertian wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III tentang Hukum Perwakafan, pada Pasal 215 ayat (1) bahwa wakaf adalah: “Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 Ayat(1)

<sup>31</sup> Dikutip dari pasal 1 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian diatas,dapat dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia sebagai shadaqah jariyah yang pahalanya terus menerus mengalir walaupun si pemberi wakaf telah meninggal dunia.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Para Imam Mazhab sepakat, wakaf itu adalah ibadah yang dibolehkan oleh syara’<sup>33</sup>. Hal ini didapat diketahui baik melalui pengertian-pengertian umum ayat al-Quran secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf, meskipun ayat tersebut tidak menyebutkan secara terperinci tentang perwakafan namun dari segi bahasa bias ditarik kesimpulan bahwa ayat tersebut bias dijadikan dasar hukum perwakafan. Di antara dalil-dalil yang dijadikan sandaran/dasar hukum wakaf dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

Q.S. al-Baqarah (2):267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri

<sup>32</sup>Kompilasi Hukum Islam BUKU III: Hukum Perwakafan Pasal 215 ayat (1)

<sup>33</sup> Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyiqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung:Hasyimi, 2016), h.289.



tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>34</sup>

Q.S. ali-Imran (3):92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>35</sup>

Dari dua ayat tersebut diatas memang tidak menjelaskan secara langsung makna kata wakaf akan tetapi kata menafkahkan sebagian harta di jalan Allah artinya sudah menjelaskan secara tersirat dari wakaf itu sendiri, pada Qs. Al-Baqarah:2;267 jelas sekali menunjukkan sebuah perintah Allah swt dalam kata أَنْفِقُوا. kepada orang yang beriman untuk menafkahkan (wakafkan) sebagian hartanya di jalan Allah, yang kemudian dipertegas lagi dalam Qs. Ali-Imran 3:92 bahwa menafkahkan sebagian harta yang ia cintai adalah sebuah kebajikan yang sempurna dan di sukai oleh Allah swt.

Dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh ibnu umar di sebutkan bahwa:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

<sup>34</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Mikhraj Khazanah Ilmu, 2013), h.45

<sup>35</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.62.

Artinya:

"Dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; 'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya". Maka 'Umar menshadaqahkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia menshadaqahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat,. untuk membebaskan budak, fii sabilillah (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya". (H.R. Bukhori Muslim)<sup>36</sup>

Hadits tersebut merupakan hadits yang menjelaskan tentang peristiwa wakaf pada masa Rasulullah. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa wakaf pertama dalam Islam. Umar RA yang pada waktu itu mendapatkan tanah dari peperangan Khaibar kebingungan sehingga bertanya kepada Nabi tentang apa yang harus dilakukan. Nabi menjawab "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya". Lalu Umar mewakafkan tanah tersebut dengan tidak menjual, menghibahkan maupun mewariskan tanah tersebut. Secara garis besar Hadist tersebut memberikan gambaran: *Pertama*, harta wakaf itu tidak dialihkan pemilikannya kepada orang lain baik dengan cara menjualnya, mewariskan atau menghibahkannya. *Kedua*, harta wakaf itu digunakan untuk amal kebajikan. *Ketiga*, harta wakaf dapat dipelihara atau dikelola oleh orang atau badan hukum tertentu, di Indonesia disebut nadzir. *Keempat*, bagi pengelola harta wakaf dapat mengambil sebahagian harta wakaf untuk keperluan dalam mengurusnya dan tidak berlebihan. Kelima, harta yang akan diwakafkan itu hendaklah yang tahan lama atau dapat diambil manfaatnya dalam waktu lama.

---

<sup>36</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT. Gramedia, 2017), h.574.

### 3. Rukun Wakaf

Wakaf sebagai sebuah pranata yang berasal dari hukum islam memegang peranan penting dalam kehidupan beragama dan sosial umat islam.<sup>37</sup>

Sesuai dengan fiqh islam maka dalam perspektif dalam kompilasi hukum islam unsur (rukun) wakaf dibagi atas 4 bagian. Karena rukun merupakan suatu sendi utama atau unsure pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu tidak akan berdiri tegak seperti halnya dengan wakaf. Rukun dan pembentukan wakaf yang dimaksud adalah:

- a. Orang yang berwakaf (yang mewakafkan hartanya) atau yang disebut dengan wakif.
- b. Harta yang diwakafkan atau maufuq
- c. Tujuan atau yang berhak menerima wakaf atau biasa disebut dengan *mauquf 'alaih*.
- d. Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut dengan *sighat* atau ikrar wakaf<sup>38</sup>

Untuk lebih jelasnya rukun atau unsur-unsur atau rukun wakaf yang telah diuraikan diatas, berikut adalah uraiannya secara satu persatu:

- a. Wakif (orang yang berwakaf)

Berarti orang atau badan hukum yang dimana orang itu berhak untuk melakukan suatu perbuatan wakaf, yang berperan sebagai subjek wakaf.

- b. Maufuq (harta yang diwakafkan)

---

<sup>37</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Cet. Ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.51.

<sup>38</sup> Kurniati, *Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.66.

Wakaf sebagai suatu jalan untuk mengalokasikan harta untuk dipergunakan demi kepentingan umum, sebagai pengabdian yang diharapkan bernilai disisi Allah karena hasil atau manfaatnya digunakan secara berulang kali atau dengan kata lain, mengambil manfaat dari benda yang diwakafkan serta mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah swt.

c. Mauquf 'alaih (nazir)

Mauquf 'alaih yaitu orang atau badan hukum atau tempat-tempat ibadah yang berhak menerima harta wakaf.

d. Sight wakaf

Sight wakaf adalah pernyataan dari yang mewakafkan harta atau benda sebagai tanda penyerahan dari harta yang diwakafkan itu. Sight wakaf dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis oleh si wakif.

#### 4. Syarat-syarat wakaf

Menurut bahasa syarat berarti sesuatu yang menghendaki bagi sesuatu yang lain.<sup>39</sup> Dalam artian bahwa syarat merupakan bagian penunjang dari sahnya suatu ibadah akan tetapi tidak termasuk bagian dari ibadah tersebut.

Wakaf merupakan suatu ibadah yang esensial bagi kehidupan manusia, memiliki kedudukan sebagai ibadah yang disyariatkan oleh Allah swt, yang berkaitan erat dengan kepentingan manusia, yang disamping isi pokoknya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Dalam perwakafan ada beberapa pokok atau syarat-syarat yang harus diperhatikan, baik itu dipandang dari hukum positif dalam artian yang diatur oleh undang-undang maupun yang diatur secara khusus oleh hukum islam itu sendiri.

---

<sup>39</sup> Satrian Efendi M. zein, *Ushul Fiqh* (Cet.V; Jakarta:Kencana, 2014), h.64.

Ketentuan pasal 215 angka2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa subjek wakaf atau yang dinamakan dengan wakif itu bisa:

- Orang;
- Orang-orang; atau
- Badan hukum<sup>40</sup>

Adapun syarat-syaratnya sebagai wakif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Apabila menjadi wakif itu orang atau orang-orang di persyaratkan:
  - 1) Telah dewasa
  - 2) Sehat akal
  - 3) Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum
  - 4) Dilakukan atas kehendak sendiri
- b. Apabila menjadi wakif itu adalah badan-badan hukum Indonesia, maka bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurus yang sah menurut hukum.<sup>41</sup>

Tanah yang berstatus hak milik secara hakiki tidak terbatas jangka waktunya sehingga dapat diwakafkan. Apabila tanah yang akan bukan tanah hak milik maka tanah yang bersangkutan harus tingkatkan status terlebih dahulu sebagai hak milik. Menurut Muh. Daud Ali barang atau benda yang diwakafkan (*Maufuq*) haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus tetap zatnya dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai, pemanfaatan itu haruslah hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum.

---

<sup>40</sup> Ketentuan dalam pasal 217 Kompilasi Hukum Islam BUKU III: Hukum Perwakafan

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h.67

- b. Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (jika berbentuk tanah misalnya)
- c. Harta yang diwakafkan itu haruslah berupa benda tidak bergerak, dapat pula berupa benda tidak bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga dan sebagainya.<sup>42</sup>

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi nadzir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi, karena tugas nadzir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan nadzir harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas itu. Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang wakaf Syarat untuk nadzir perorangan

- 1) Warga negara Indonesia,
- 2) Beragama Islam,
- 3) Dewasa,
- 4) Amanah,
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani, serta
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Untuk nadzir organisasi syaratnya adalah:

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan,
- 2) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.<sup>43</sup>

Sedangkan syarat untuk nadzir badan hukum adalah:

- 1) Harus badan hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

---

<sup>42</sup> Kurniati, *Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*, h.66.

<sup>43</sup> Lebih lanjut bisa dibaca di <http://bwikotamalang.com/syarat-nadzir> (diakses Selasa 17 April 2018 pukul 09.38 wita)

- 2) Mempunyai perwakilan dikecamatan tempat Tanah wakaf.<sup>44</sup>

Syarat terakhir yaitu Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya. Syarat lafal wakaf adalah:

- 1) Pernyataan wakaf bersifat ta'bid (untuk selama-lamanya)
- 2) Pernyataan lafal bersifat tanjiz. Artinya lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf.
- 3) Pernyataan wakaf itu harus tegas (*jadzim*)
- 4) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal.
- 5) Menyebutkan *mauquf 'alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf
- 6) Pernyataan wakaf dinyatakan *lafaz sharih* (Jelas).<sup>45</sup>

Dengan demikian seperti halnya ibadah-ibadah yang lain wakaf juga mempunyai syarat-syarat khusus untuk menunaikannya karena tanpa terpenuhinya syarat tersebut, maka ibadah wakaf bisa saja menjadi batal.

## 5. Objek dan Fungsi Wakaf

Dari defenisi wakaf menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 dapat disimpulkan bahwa objek perwakafan berupa hak milik. Menurut pasal 20 Undang-undang nomer 5 tahun 1960 (UUPA) maka hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UUPA. Terkuat artinya hak milik atas tanah tidak dibatasi jangka waktunya, dan supaya mudah dipertahankan terhadap pihak lain, maka hak milik atas tanah harus didaftarkan. Terpenuh artinya pemegang hak milik atas tanah bebas menggunakan tanah untuk

---

<sup>44</sup> Andi Tahir Hamid, *Pengadilan Agama & Bidangnya* (cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.101.

<sup>45</sup> Rozalinda, *Menajemen Wakaf Produktif* (Cet.II; Jakarta:Raja Grafindo, 2016), h.30-h.33.

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengikat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif kompilasi Hukum Islam maupun hukum alam pada umumnya benda yang dapat diwakafkan tidak harus dalam bentuk benda yang tidak bergerak (benda tetap) misalnya tanah, namun benda yang pada umumnya diwakafkan. Dalam perspektif hukum Islam benda-benda selain tanah dapat saja diwakafkan sepanjang benda tersebut bila digunakan atau diambil manfaatnya tidak seketika habis atau musnah.<sup>46</sup>

Persyaratan tersebut sejalan dengan fungsi wakaf seperti tertuang dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 yang berbunyi : “Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai tujuan wakaf”. Artinya bukan mengekalkan objek wakaf melainkan mengekalkan manfaat dari benda milik yang telah diwakafkan sesuai peruntukan wakaf yang bersangkutan.<sup>47</sup>

## **6. Pendaftaran Tanah Wakaf**

Kewajiban pendaftaran wakaf tanah milik diatur dalam pasal 10 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977, yang kemudian lebih lanjut dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai pewakafan tanah milik.

Pewakaf harus menghadap PPAIW<sup>48</sup> untuk ikrar. Disaksikan minimum 2 orang saksi supaya sah. Harus membawa serta menyerahkan dan menyerahkan kepada PPAIW :

---

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Cet. Ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.66.

<sup>47</sup> Penjelasan tentang fungsi wakaf yang dikutip pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977

<sup>48</sup> PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.



- a. Sertifikat hak milik serta bukti milik lainnya
- b. Surat keterangan kepala desa yang diperkuat oleh Camat tentang kebenaran kepemilikan dan tidak tersangkut sengketa.
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
- d. Izin Bupati/Walikota/madya cq Kepala sub dit Agraria.<sup>49</sup>

Hal itu ditegaskan dalam peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Bahwa pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.<sup>50</sup>

Kalau belum bersertifikat dibuatkan sertifikatnya. Setelah itu nazir wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KUA Kecamatan.

Yang bertindak sebagai PPAIW ialah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama bentuk akta ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

Tanah wakaf didaftarkan di Kantor Agraria kabupaten/kota madya setempat. yang berkewajiban mengajukan permohonan adalah PPAIW dalam jangka waktu 3 bulan.

Terlebih dahulu harus diadakan pemisahan dari bagian tanah yang tidak diwakafkan masing-masing dibuatkan buku tanah dan sertifikat tetap atas tanah wakif.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Andi Tahir Hamid, *Pengadilan Agama & Bidangannya* (cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.102

<sup>50</sup> Andi Tahir Hamid, *Pengadilan Agama & Bidangannya*, h.102

<sup>51</sup> Andi Tahir Hamid, *Pengadilan Agama & Bidangannya*, h.103.

Berdasarkan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf oleh kantor pertanahan setempat dilakukan:

- a. Pencoretan nama/nama-nama pemegang hak yang lama, yaitu pihak pemebri wakaf (wakif).
- b. Mencantumkan Kata-kata “wakif” dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- c. kata-kata “diwakafkan untuk :..... Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan..... Tanggal ..... nomor ..... Pada halaman tiga kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya.
- d. Mencantumkan nama-nama *Nazir* pada halaman tiga kolom nama yang berhak dan pemegang hak lainnya dalam buku tanah dan sertifikatnya, pengisian kolom-kolom lainnya halaman tiga dalam buku tanah dan sertifikat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>52</sup>

Jika ada *Nazir* yang meninggal/ mungundurkan diri harus dilakukan pencoretan nama dan penggantian nama baru dalam buku tanah. Penggantian tersebut tidak mengakibatkan peralihan tanah, biaya pendaftaran/pencatatan wakaf bebas, kecuali pengukuran dan materai.

---

<sup>52</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Cet. Ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.92.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### ***1. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian digunakan penulis adalah Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Dengan menggunakan metode penelitian dekskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya. Metode ini sesuai untuk meneliti kesadaran hukum Masyarakat dalam pengurusan legalitas tanah wakaf di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa secara lebih mendalam. Hasil penelitian ini juga membuka jalan bagi penelitian untuk mengadakan penelitian atau kajian lebih mendalam.

###### ***2. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini yaitu di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Khususnya lembaga-lembaga yang menangani perwakafan yang ada di Kecamatan Tompobulu.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah:

###### ***1. Pendekatan Yuridis Sosiologis***

Yaitu untuk meneliti kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan legalitas tanah wakaf di, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Metode ini mengamati bagaimana hukum diterapkan, digunakan dan dipakai dalam masyarakat, karena pada saat hukum itu dijalankan (dalam masyarakat), maka terjadilah interaksi antar hukum dan perilaku masyarakat yang menggunakannya

## 2. *Pendekatan Yuridis Normatif*

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. *Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)*

Pendekatan teologi normatif adalah pendekatan terhadap hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

## C. *Sumber Data*

### 1. *Data Primer*

Data Primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dimungkinkan variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi dengan kondisi. Sumber informasi melalui wawancara responden yang bersangkutan dengan perwakafan tanah, mulai dari pejabat yang berwenang untuk menangani masalah perwakafan tanah, tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Tompobulu serta dari elemen masyarakat lainnya yang dianggap faham dalam permasalahan tersebut.

### 2. *Data Sekunder*

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dalam penulisan ini data sekunder diperoleh dari studi literatur dan Undang-Undang sebagai bahan pustaka, ketentuan-ketentuan mengenai perwakafan tanah dan juga perundang-undangan.

### 3. *Data Tersier*

Data tersier yaitu data yang diambil dari sumber yang dipublikasikan, seperti jurnal pelatihan hukum, buku-buku hukum, literature hukum dan media lainnya. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan kamus besar

bahasa Indonesia, kamus hukum dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

#### ***D. Teknik Pengumpulan Data***

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan focus penelitian, maka yang dijadikan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

##### ***1. Wawancara (interview)***

Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Interview bertujuan untuk menggali secara mendalam pandangan informan terhadap suatu objek dalam penelitian, disini terjadi interaksi antara peneliti dan informan dengan mengadakan kegiatan mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu sebagai bahan kajian.

Proses wawancara pada umumnya dilakukan secara terstruktur karena peneliti rata-rata tidak mengetahui permasalahan secara mendalam, oleh karena itu kegiatan wawancara dalam penelitian sangat penting karena bertujuan untuk menggali informasi mendalam-dalamnya dari orang (informan) yang dianggap faham terhadap masalah yang diteliti sehingga data yang diperoleh lebih lengkap.

##### ***2. Observasi***

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

### 3. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca *literature*, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti berkenan dengan penelitian yang sedang diteliti.

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih untuk dimasukkan sebagai focus penelitian, dokumen yang diambil berfungsi sebagai penyokong dari hasil penelitian sehingga data yang disajikan lebih valid dan lengkap sehingga hasil penelitian tersebut lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan bersifat ilmiah.

#### **E. Instrument Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Maka, untuk penelitian Lapangan, Instrument pendukung pada penelitian ini adalah menggunakan alat perekam suara atau tape recorder, kamera digital, serta alat tulis. Tape recorder digunakan untuk merekam data lisan saat wawancara, kamera digital untuk mengambil gambar atau foto. Alat tulis digunakan untuk mencatat dan catatan ini merupakan catatan lapangan.

#### **F. Teknik Pengolahan Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, Observasi, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data:

*a. Reduksi Data*

Merupakan proses pemilihan, focus perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah penelitian memperoleh data, harus lebih dahulu dikaji kelayakannya dengan memilih data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

*b. Penyajian Data (display)*

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

Dengan penyajian data (*display*) akan mempermudah untuk memahami kejadian yang terjadi saat penelitian berlangsung. Selanjutnya di perlukan adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang dipahami kejadian yang terjadi di lapangan selama penelitian berlangsung. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif juga berupa bahasa nonverbal seperti grafik, tabel dan lain sebagainya berdasarkan kategori pengelompokan yang dibutuhkan dalam penyajian data tersebut.

*c. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)*

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan bisa menjawab fokus penelitian yang telah dirancang sejak awal, sehingga diharapkan dalam penelitian ini dapat menemukan teori baru ataupun temuan yang baru yang berupa

gambaran terhadap suatu objek yang belum jelas tapi setelah adanya penelitian maka objek itu bisa dijelaskan berdasarkan teori-teori atau fakta yang ditemukan dilapangan, sehingga dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data pada dasarnya bertujuan untuk menyanggah balik balik tuduhan kepada penelitian yang mengatakan penelitian tersebut tidak ilmiah, selain itu juga pemeriksaan terhadap keabsahan data juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penelitian yang bersifat ilmiah.<sup>53</sup>

Keabsahan data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus termasuk kedalam pengujian data yang diperoleh. Keabsahan data pada penelitian ini mencakup uji *Credibility, transferability, dependability* dan *confirmability*.<sup>54</sup>

#### **1. Credibility**

Uji *credibility* atau uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan pada data yang merupakan hasil dari suatu penelitian dengan tujuan agar hasil penelitian yang disajikan tidak diragukan sebagai suatu karya tulis yang bersifat ilmiah.

Adapun uji *credibility* yang digunakan dalam penulisan ini adalah untuk menguji kepercayaan terhadap data yang disajikan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Merupakan kesimpulan dari buku Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.320.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2007), h.270.



#### a. Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian

Dengan meningkatkan kecermatan secara terus-menerus maka kepastian data dan rentetan kronologi kejadian (peristiwa) dapat didokumentasikan atau dicatatkan dan direkam dengan baik sehingga informasi yang didapatkan di lapangan dapat disusun secara sistematis untuk menjadi sebuah data dalam penelitian, sehingga data tersebut dapat dipastikan apakah data tersebut sudah pantas untuk dimasukkan ke dalam hasil penelitian atau belum.

Dalam peningkatan kecermatan dalam penelitian dilakukan dengan cara membaca berbagai sumber referensi seperti buku, artikel dan hasil penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen terkait, sehingga penulis dapat memperoleh perbandingan sehingga peneliti akan semakin cermat dalam penyajian data.

#### b. Menggunakan Referensi

Referensi merupakan pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Referensi mempunyai kedudukan yang sangat urgen untuk menyokong keabsahan penelitian, sebaiknya data tersebut dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto atau dokumen autentik sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya.

#### c. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan dari *membercheck* yaitu untuk mengidentifikasi sejauh mana data yang diperoleh itu sesuai dengan apa yang disajikan oleh pemberi data.

Dengan demikian *membercheck* bertujuan agar informasi yang diperoleh atau akan digunakan oleh penulis itu apakah sesuai dengan sumber yang dimaksud sebagai salah satu data penelitian.

## **2. Transferability**

*Transferability* adalah merupakan Validitas eksternal dimana menunjukam derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian di mana sampel atau data tersebut diambil.

Bagi peneliti nilai transfer bergantung pada pihak yang terkait sehingga dapat membuat penelitian digunakan dalam konteks yang berbeda sekalipun dalam konteks social yang berbeda, validitas nilai transfer masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.

## **3. Dependability (reliabilitas)**

Reabilitas biasa disebut dengan penelitian yang dapat dipercaya, dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan beberapa percobaan tetapi tetap mendapatkan hasil yang sama.

Penelitian *deperbility* adalah penelitian yang apabila penelitian dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama juga.

Pengujiannya dilakukan dengan cara mengaudit proses penelitian keseluruhan. Misalnya bagaimana peneliti menentukan masalah, terjun ke lapangan untuk proses pengumpulan data, melakukan analisis data sampai kepada penyajian data sebagai hasil dari penelitian.

## **4. Comfirmability**

*Comfimabilty* disebut juga dengan objektivitas penelitian maksudnya penelitian bisa dikatakan objektif apabila telah disepakati oleh banyak orang.

Dengan kata lain uji *confirmabilty* berarti menguji hasil penelitian yang dilakukan dengan mengaitkan terhadap proses yang telah ada.

Keabsahan data adalah data yang mempunyai kesamaan data yang diperoleh oleh peneliti dengan data fakta yang terjadi pada objek penelitian, sehingga validitas atau keabsahan datanya dapat dipertanggungjawabkan.



## **BAB IV**

### **ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Perwakafan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa***

##### **1. Gambaran Umum Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa**

Nama kecamatan Tompobulu terdapat di beberapa tempat di Sulawesi Selatan antaranya terdapat di Kabupaten Bantaeng, Maros dan khususnya di Kabupaten Gowa yang menjadi fokus lokasi penelitian terhadap urgennitas Masyarakat terhadap legalitas tanah wakafnya.

Tompobulu secara bahasa berasal dari dua kata yaitu *Tompo* dan *Bulu* yang merupakan bahasa Makassar yang mempunyai makna yakni *Tompo* berarti Puncak, ketinggian atau di atas. Sedangkan kata *Bulu* bermakna gunung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tompobulu diartikan sebagai suatu wilayah yang berada di pegunungan.

Tompobulu merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Gowa yang mempunyai ibu kota yang berkedudukan di Malakaji, daerah ini merupakan daerah dataran tinggi, dengan permukaan tanah yang mempunyai rata-rata ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut.

Malakaji yang merupakan ibukota dari Kecamatan Tompobulu yang mempunyai jarak 147 km dari Ibukota Kabupaten Gowa yaitu Sungguminasa dengan waktu jarak tempuh  $\pm 3$  jam perjalanan. Terdapat beberapa akses jalan yang menghubungkan antara Sungguminasa dengan Malakaji, antara lain akses jalan Pallangga-Bungayya, jalan Poros Takalar-Biringbulu dan jalan Sungguminasa-Jeneponto. Akses utama dipergunakan warga dari sejak dahulu yaitu akses jalan Nasional yang mempunyai jalur Makassar-

Jeneponto, karena dua akses yang lain terbilang ekstrime dimana jalurnya dipenuhi dengan jalan yang berliku dan tanjakan.

Sebagaimana yang dibahas sebelumnya Tompobulu merupakan daerah pegunungan yang secara geografis terletak di kaki Gunung Lompobattang, wilayah ini berbatasan langsung dengan daerah :

- Sebelah Timur berbatasan langsung dengan kecamatan Kelara' Kabupaten Jeneponto.
- Sebelah Utara berbatasan langsung dengan kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.
- Sebelah Barat mempunyai batas langsung dengan daerah kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, mempunyai luas wilayah 169,46 Km<sup>2</sup>. Wilayahnya meliputi daerah dataran Tinggi di Kabupaten Gowa, pada wilayahnya terbagi atas 2 Kelurahan dan 6 Desa, secara terperinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah
1	Kelurahan Malakaji	6,21 Km <sup>2</sup>
2	Kelurahan Cikoro	17,33 Km <sup>2</sup>
3	Desa Rappolemba	32,56 Km <sup>2</sup>
4	Desa Rappoala'	31,76 Km <sup>2</sup>
5	Desa Datara	23,55 Km <sup>2</sup>
6	Desa Tanete	22,91 Km <sup>2</sup>
7	Desa Bontobuddung	17, 02 Km <sup>2</sup>
8	Desa Garing	18, 12 Km <sup>2</sup>
	<b>Jumlah</b>	<b>169,46 Km<sup>2</sup></b>

*Sumber: Kantor Kecamatan Tompobulu Tahun 2017*

Berdasarkan data kependudukan tahun 2013 Kecamatan Tompobulu memiliki penduduk sebesar 29.749 Jiwa. Terdiri dari 14.385 Jiwa penduduk Laki-laki, dan jumlah perempuan 15.364 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 7.534.<sup>55</sup> penduduk Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa pada umumnya berprofesi sebagai Petani padi, berkebun, dan sebagian warga bergerak pada usaha sektor non pertanian dan perkebunan terutama pada sektor perdagangan.

## **2. Gambaran Perwakafan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa**

Objek yang diwakafkan adalah harta yang dalam kategori bergerak dan tidak bergerak, harta yang dalam kategori tidak bergerak bisa dalam bentuk Tanah, hak milik atas rumah, atau hak milik atas benda tidak bergerak lainnya, sementara untuk objek wakaf harta tidak bergerak dapat dalam bentuk uang.<sup>56</sup>

Pada umumnya praktek perwakafan di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yaitu wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak, yaitu dalam bentuk tanah milik untuk di wakafkan kepada lembaga atau yayasan demi kepentingan umum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Ismail B. dia mengatakan “Anjo Tawwa ri Tompobulu Na wakafkanngi Buttanna simatamata karena Allah untuk ni baungi Masigi, sekolah atau Madrasah, pemakaman siagang ri marengannayya iami antu untuk umum”.<sup>57</sup> Dalam bahasa Indonesia bapak Ismail B mengatakan masyarakat Tompobulu mewakafkan Tanah untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah

---

<sup>55</sup>Data Kantor Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, 2018

<sup>56</sup>Tim El-madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), h.101.

<sup>57</sup> Ismail B (44Tahun), Imam Desa Tanete, Wawancara, Batupewai Desa Tanete, 19 Juni 2018..

atau madrasah, pemakaman dan lainnya dengan niatnya yaitu karena Allah. Lanjut lagi salah seorang informan yaitu ustad Makkatang menambahkan, ”punna butta wakaf kulle tongi untuk pembangunan jalanan umum”<sup>58</sup> dia menambahkan bahwa tanah wakaf juga bisa untuk jalanan umum yang jelas menurutnya bisa di gunakan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan dari Kantor Urusan Agama di Tompobulu terdapat 95 Lokasi Tanah wakaf yang ada di kecamatan Tompobulu yang yang dibagi menjadi beberapa jenis Tanah wakaf seperti untuk pembangunan Masjid, Pondok Pesantren, Pemakaman, sekolah atau Madrasah, Panti Asuhan, usaha dan lain-lain. Akan tetapi terdapat masalah pada data tersebut berdasarkan hasil observasi lokasi tanah wakaf yang ada di kecamatan Tompobulu bukan hanya berjumlah 95 lokasi saja akan tetapi ada kurang lebih 225 tanah wakaf yang ada dikecamatan Tompobulu yang artinya masih 130 tanah wakaf yang belum terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan Tompobulu.

Memang kalau dilihat angka 95 lokasi tanah wakaf secara tersirat memang angka tersebut cukup tinggi. Akan tetapi, kalau dilihat dari data, kita fokuskan pada kurun waktu tahun 2014-2018 hanya ada satu lokasi tanah wakaf yang terdaftar di kantor urusan agama Tompobulu kabupaten Gowa. Sedangkan disisi lain masih banyak tanah wakaf yang belum didaftarkan minimal sampai kepada penerbitan AIW (Akta Ikrar Wakaf).

Inilah salah satu problematikah tentang gambaran perwakafan tanah milik yang ada di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, bahwa masalah kesadaran hukum merupakan hal yang paling penting dan paling urgen untuk diperhatikan, demi tercapainya masyarakat yang sadar akan pentingnya

---

<sup>58</sup> Bapak Makkatang (57 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Malakaji, 17 Juni 2018,

hukum, dan mengamalkan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Terkhusus pada masalah perwakafan tanah milik, yang tentunya kesadaran itu penting guna menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

***B. Kesadaran Hukum Terhadap terhadap Legalitas Tanah Wakaf di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa***

Kesadaran hukum adalah merupakan sekumpulan nilai-nilai dasar yang terkandung setiap individual atau pada diri manusia, yang di konsepsikan pada suatu pemahaman tentang apa yang di ketahuinya kemudian di aplikasikan pada kehidupannya melalui sikap ataupun pola perilaku setiap individu dalam kehidupannya sehari-hari.

Kesadaran hukum masyarakat dapat di ketahui dengan menggunakan indikator-indikator kesadaran hukum yang mencakup dari konsep dari kesadaran hukum samai pada pengaplikasiannya dalam artian bahwa indikator kesadaran hukum merupakan tahapan-tahapan tolak ukur dari kesadaran hukum masyarakat yaitu : pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.

Indikator kesadaran hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kesadaran hukum masyarakat. Sehingga dapat menjadi tolak ukur apakah kesadaran hukumnya masih rendah atau sudah tinggi. Sehingga dalam penelitian ini indikator kesadaran hukum yang mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum dapat menjadi patokan dalam mengidentifikasi bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan legalitas tanah wakafnya yang ada di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

**1. Pengetahuan Hukum Masyarakat**

Pengetahuan hukum masyarakat yang dimaksud yaitu pengetahuan para pihak yang terkait dalam hal ini pemberi atau penerima wakaf tentang Undang-



Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mana menjadi dasar dalam praktek perwakafan di Indonesia.

Pengetahuan hukum bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam tentang sejauh mana masyarakat tau tentang aturan-aturan dalam praktek perwakafan. Sehingga, berdasarkan hasil olah wawancara menunjukan bahwa dari 10 informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, hasilnya tak seorangpun informan yang mengetahui secara persis bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang merupakan dasar aturan praktek perwakafan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan tentang pengetahuan hukum masyarakat berkaitan dengan praktek perwakafan tanah di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dapat dilihat dari uraian wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut : menurut Bapak M. Syarif, S.Pd dg. Sibali “Tena Ku issengi aturan-aturanna masalah perwakafannga, tapi ku issengi ia kunggi nia undang-undang anggatoroki masalah perwakafanga tapi tena ku issengi kunggi undang-undang nomoro sikura siagang taung siapa.”<sup>59</sup> Berdasarkan hasil wawancara tersebut informan di atas bahwasanya inti daro yang disampaikan Bapak M. Syarif dg. Sibali adalah informan tersebut tidak tau secara persis tentang perundang-undngan yang mengatur tentang praktek perwakafan akan tetapi menurutnya memang terdapat aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pengurusan Tanah wakaf tetapi untuk lebih jelasnya mengenai Undang-undang nomor berapa dan Tahun berapa informan tidak tau masalah itu.

Pendapat lain di kemukakan oleh bapak Abdullah yaitu “punna abbicara atorang pengurusan sahna anjo wakafka memang nia atorang anggatoroki

---

<sup>59</sup> M. Syarif (44 Tahun), Pewakaf, *Wawancara*, Ulugalung, 21 Juni 2018.

masalahna injo mingka tena ku issengi anjo jelasna undang-undang sikura injo anggoloji”<sup>60</sup> menurutnya kalau berbicara masalah pengurusan legalitas tanah wakaf memang diatur oleh undang-undang tapi dia tidak tau undang-undang berpa yang mengatur masalah itu.

Sedangkan pihak lain Bapak Jamaludin merupakan kepala Sekolah MTs. Al-maarif Mampua yang merupakan satu-satunya tanah wakaf yang terdaftar di kantor KUA Tompobulu Kabupaten Gowa dalam kurung waktu 2014-2018 dia mengatakan “memang terdapat dasar hukum kepengurusan sertifikat atau legalitas tanah wakaf, namun tidak mengetahui secara pasti nomor undang-undang yang menjadi dasar kepengurusan legalitas atas tanah wakaf tersebut, karena menurutnya informasi adanya hukum tersebut diperoleh dari KUA pada saat ingin melakukan ikrar wakaf di KUA akan tetapi dia tidak lagi memperoleh informasi mengenai dasar hukum dari perwakafan itu dan sebagainya setelah melakukan kepengurusan ikrar Wakaf.”<sup>61</sup>

Dari ketiga informan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa informan memang mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur terkait legalitas atau praktek perwakafan, akan tetapi dari ketiga informan tersebut tidak mengetahui secara pasti undang-undang atau aturan lain yang menjadi dasar hukum pengurusan tanah wakaf.

Untuk lebih jelas lagi terdapat data penelitian maka di uraikan lagi beberapa data yang merupakan pendapat dari informan berikut ini:

Menurut Pak Gaffar: “tena ku issengi kunggi nia undang-undang anggatoroki masalah perwakafanga, iana isse ia na sabakii tena todo injo

---

<sup>60</sup> Abdullah (46 Tahun), Tokoh Masyarakat dan Pewakaf, *Wawancara*, Cikoeo 10 Juni 2018.

<sup>61</sup> Jamaluddinn, (32 Tahun), Kepala Sekolah Mdarasah Al-Maarif, *Wawancara*, Mampua, 11 Juni 2018.

semcam sosialisasi mange ri masyarakat, mungkin nia'ja mingka la tikamma todo bateta gitte punna tena todo semacam sosialisasi battu ri pammaretayya.<sup>62</sup> Menurut bapak Gaffar dia tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur masalah perwakafan, menurutnya hal itu disebabkan dengan salah satu faktornya yaitu tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait selama ini sehingga mengakibatkan pemahaman hukum masyarakat juga akan berpengaruh didalamnya.

Sedangkan menurut pendapat lain yang dikemukakan oleh bapak H. abd Sahid, menurutnya: “tena ku issengi kunggi nia aturang khusus atau undang-undangna anjo perwakafanga, na saba' lanri tenana sosialisasi na semacamnya siangang tena mantodo usaha untuk amboyai atau ampapilajari masalahna anjo wakafka”<sup>63</sup> bapak H. Abd sahid menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa ada atauran atau undang-undang yang mengatur tentang perwakafan menurutnya disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi dan keinginan pihak atau masyarakat untuk mencari tahu atau mendalami masalah perwakafan tersebut.

Sehingga berdasarkan uraian di atas menyatakan bahwa masyarakat dalam hal pengetahuan hukum tidak mengetahui secara pasti tentang adanya undang-undang yang menjadi dasar hukum praktek perwakafan, yang mena rata-rata informan mengakui tidak adanya sosialisasi tentang aturan perwakafan itu tidak ada dan di tambah lagi dengan tidak adanya inisiatif dari masyarakat itu sendiri untuk mencari tahu tentang dasar hukum perwakafan.

Jadi dari keseluruhan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan hukum masyarakat dapat dikatakan masih dalam kategori sangat rendah, karena dari total jumlah 10 orang yang menjadi sampel dalam penelitian

---

<sup>62</sup> Pak Gaffar (54 Tahun), Pewakaf, *Wawancara*, Datara, 15 Juni 2018.

<sup>63</sup> H abd sahid (65 Tahun), Pewakaf Masjid Talangkasa, *Wawancara*, Garing, 13 Juni 2018.

ini tak seorangpun mengetahui bahwa Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah dasar hukum dari praktek perwakafan.

## **2. Pemahaman Hukum**

Pemahaman hukum yang di maksud adalah pemahaman masyarakat atau penerima tanah wakaf di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa tentang tata cara kepengurusan legalitas tanah wakafnya, sehingga diperoleh gambaran tentang pemahaman masyarakat dalam hal kepengurusan legalitas tanah wakaf khususnya yang ada di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Berdasarkan fakta di lapangan yang berpatokan pada hasil wawancara yang dilakukan pada 10 orang informan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, yang dianggap paham tentang tata cara kepengurusan perwakafan hanya 2 orang informan yang di anggap paham tentang tata cara perwakafan Tanah. Sedangkan yang tidak faham ada 8 orang informan.

Menurut H. Sanusi Tuppu beliau mengomentari masalah pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Tompobulu dia mengatakan bahwa “jangan bicara aturan atau tata cara berwakaf mungkin untuk mengetahui definisi dari wakaf itu sendiri masyarakat belum tau membedakan yang mana wakaf yang mana hibah, padahal itulah hal yang mendasar dalam hal pemahaman hukum masyarakat.”<sup>64</sup> Para informan atau penerima tanah wakaf yang tidak faham akan pengurusan tanah wakaf itu disebabkan karena kurangnya inisiatif dari masyarakat untuk menggali informasi untuk memahami tatacara pengurusan legalitas tanah wakaf, dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat tentang perwakafan menjadi salah satu alasan kurangnya pemahaman masyarakat serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang yang menjadi dasar hukum kepengurusan legalitas tanah wakafnya.

---

<sup>64</sup> H. Sanusi Tuppu (71 Tahun), Pewakaf Masjid Nurul Iman, wawancara, Tanete, 09 Juni 2018.

Tata cara pengurusan legalitas tanah wakaf yang dikemukakan oleh bapak Hamzah, S.HI, “harus ada kesepakatan antara semua pihak yang terkait dengan tanah wakaf tersebut dengan melakukan sosialisasi dengan pihak keluarga dan pemerintah desa atau tempat tanah wakaf itu dalam hal sebagian atau dari tanah miliknya akan diwakafkan, kemudian setelah adanya kesepakatan maka selanjutnya menuju ke kantor KUA untuk menyampaikan niatnya kepada PPAIW untuk mewakafkan tanah miliknya demi kepentingan umum, disertai dengan membawa membawa berkas-berkas yang dibutuhkan untuk administrasi seperti : fotocopy KTP dan kartu keluarga pemberi wakaf (wakif), fotocopy KTP penerima tanah Wakaf, SK penerima tanah wakaf, dan sertifikat tanah yang akan diwakafkan. Kemudian kedua pihak si pemberi dan penerima wakaf melakukan ikrar wakaf di depan PPAIW selanjutnya akan dibuatkan akta ikrar wakaf dan diterbitkan akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Setelah itu, pihak ditunjuk membawa berkas-berkas yang dibutuhan tersebut ke BPN kabupaten Gowa berkas tersebut adalah berkas yang bersifat administratif seperti sertifikat Tanah sebelum diwakafkan (sertifikat milik), akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW, surat pengesahan Nazir, surat permohonan persertifikatan yang ditujukan kepada BPN dan berkas yang bersifat Administratif yang terkait lainnya.”<sup>65</sup>

Akan tetapi menurut bapak Gaffar “tena kuissengi masalah tikamma carana tawwa andattaraki butta wakafka iannaji ia punna erokki tawwa wakafkangi buttanna palingan na kunggi tawwa karena le'bami ku niakkan karena Allah”<sup>66</sup> menurutnya dia secara pribadi tidak mengetahui tatacara mendaftarkan tanah wakaf cuman kebanyakan orang berprinsip yang jelas

---

<sup>65</sup> Hamzah (38 Tahun), Penyuluh Agama, *Wawancara*, Malakaji, 02 Juni 2018.

<sup>66</sup> Pak Gaffar (54 Tahun), Pewakaf, *Wawancara*, Datara, 15 Juni 2018.

persoalan wakaf itu persoalannya dengan Allah swt. Yang jelas orang itu telah berniat karena Allah untuk mewakafkan tanahnya, mempertegas dari pendapat itu Bapak M. Syarif menambahkan bahwa “perlu ada sosialisasi dari pemerintah terait dalam hal ini KUA untuk memberikan pemahaman kepada kami sebagai masyarakat karena kalau berbicara wakaf itu merupakan masalah yang sangat tabuh dan kurang pemahaman kami tentang itu sehingga sebagian besar masyarakat tidak memahami bagaimana wakaf itu.”<sup>67</sup>

Dari keseluruhan pemaparan diatas, memberikan gambaran bahwa pemahaman hukum masyarakat dalam hal tata cara pengurusan sertifikat atau legalitas tanah wakaf di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa masih sangat rendah karena berdasarkan hasil olah wawancara di lapangan hanya 2 orang dari 10 informan yang dianggap memahami tentang tatacara pendaftaran sertifikat atau legalitas tanah wakaf. Rendahnya pemahaman tersebut disebabkan lagi masalah kurangnya pemahaman masyarakat bahwa wakaf secara lisan yang dilakukan oleh masyarakat itu dapat berpotensi terjadinya sengketa dikemudian hari karena tidak adanya legalitas dari tanah wakaf tersebut, sosialisasi dari pemerintah serta kurangnya inisiatif dari masyarakat untuk mencari tahu tentang masalah perwakafan.

### **3. Sikap Hukum**

Sikap hukum yaitu penilaian masyarakat yang di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa tentang kepemilikan sertifikat sebagai legalitas tanah wakafnya, yang mana sikap hukum masyarakat akan membawa kita untuk menggali lebih dalam tentang informasi tentang penilaian atau respon masyarakat terhadap kepemilikan legalitas tanah wakaf, apakah legalitas tersebut merupakan hal yang fundamental dalam praktek perwakafan ataukah

---

<sup>67</sup>M. Syarif (42 Tahun), Pewakaf, *Wawancara*, Ulugalung, 21 Juni 2018.

justru masyarakat menggap bahwa dalam hal perwakafan sertifikat tanah wakaf itu justru tidak penting baginya.

Berdasarkan olah wawancara yang dilakukann kepada beberapa informan yang melakukan praktek perwakafan atau dianggap memahami perwakafan di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, diperoleh data, terdapat 4 orang informan mengatakan setuju terhadap legalitas tanah wakaf tersebut akan tetapi 6 orang lainnya mennggap bahwa pengurusan legalitas itu tidak terlalu penting untuk diperhatikan. Berdasarkan kesimpulan dari wawancara 4 orang informan yang mengatakan setuju bahwa mereka menggap kepemilikan legalitas tanah wakaf itu memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam perwakafan karena menggap sertifikat tanah wakaf penting untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, dan legalitas tanah wakaf tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan hukum.

Sedangkan pihak yang mengatakan tidak setuju dengan legalitas tanah wakaf salah satunya di kemukakan oleh M. Syarif S.Pd, “injo tawwa na wakafkangi buttanna simata-mata karena Allah berarti urusanna siagangji karaeng Allah ta’ala jari ni anggapki anjo pengurusan singkammaji formalitasji jari punna tena tommo battu ri pemarenta terkaitka dalam hal ini KUA untuk apa ni urusu yang jelas le’bami ni niakka karena Allah, harusna pole injo istilahna menjemput bolalah punna memang eroki tawwa ni suro anggurusu.”<sup>68</sup> Berdasrkan olah wawancara tersebut jelas sekali informan mengatakan bahwa pengurusan legalitas tanah wakaf itu hanya sekedar formalitas belaka yang mana menurutnya persoalan wakaf adalah persoalan seorang hambah kepada tuhan nya jadi kalau sudah di niatkan karena Allah menurutnya tidak penting lagi untuk melakukan pengurusan tersebut, jika tidak

---

<sup>68</sup> Syahrir (39 Tahun), Pewakaf, *Wawancara*, Bontobuddung, 06 Juni 2018.

ada inisiasi informan juga memberikan saran bahwa pemerintah terkait harus aktif mendata tanah wakaf jika memang serius untuk melakukan hal tersebut.

Sedangkan menurut bapak Syahrir “pengurusan legalitas tanah wakaf itu menganggap tidak penting karena sudah terdapat sertifikat tanah milik, jadi kalau ada potensi sengketa dikemudian hari kan ada sertifikat yang saya pegang”. Kedua informan tersebut sudah mewakili pendapat dari 4 informan lainnya yang kebanyakan mengatakan bahwa persoalan wakaf adalah persoalan seorang hamba dengan Tuhannya, jadi tidak setuju jika diharuskan untuk mengurus legalitas wakaf tersebut.

Berdasarkan uraian di atas bahwa mereka menganggap pengurusan legalitas tanah wakaf itu merupakan formalitas belaka karena informan menganggap bahwa persoalan wakaf merupakan persoalan hubungan dengan Allah jadi kebanyakan orang melakukan praktek perwakafan secara lisan yang disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat terhadap masalah legalitas tanah wakaf tersebut.

Sehingga berdasarkan data dari informan tersebut di atas bahwa sikap hukum penerima tanah wakaf di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa terhadap legalitas tanah wakafnya masih tergolong rendah, karena dapat dilihat dari banyaknya informan yang mengatakan tidak setuju terhadap pengurusan legalitas tanah wakafnya, dari 10 informan 6 orang mengatakan tidak setuju. Hal tersebut disebabkan bahwa masyarakat yang tidak setuju tersebut, tidak menyadari bahwa kepemilikan sertifikat sebagai legalitas tanah wakaf bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan sehingga menjadi salah satu upaya dalam hal terjadinya sengketa di kemudian hari.



#### 4. Pola Perilaku Hukum Masyarakat

Pola perilaku hukum yang dimaksud adalah mengenai pernah atau tidak masyarakat penerima tanah wakaf di kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa melakukan dalam melakukan pengurusan sertifikat sebagai legalitas tanah wakaf.

Hasil analisis olah data, yang menunjukkan dalam kurun waktu 2014-2018 hanya ada satu yang melakukan pengurusan legalitas tanah wakaf yaitu wakaf pembangunan madrasah Tsanawiyah Al-maarif Mampua yang dalam hal ini pihak terkait bapak Jamaluddin sebagai kepala madrasah tsanawiyah Al-marif mengatakan bahwa “punna bicara wakafki tawwa haruspi nasetujui oleh semua pihak, karena anjo wakafka anu bias aloe sikali masalah, kamma inne sikolayya jai sikali manfaatna sincaddina masalah bantuanga, siagang kemungkinan terjadinya sengketa memang ia punna masalah wattu loe waktu na pakai sa’genna lebba ni sertifikatkan tapi manna kaminjo bajikanggaji dari pada nia masala sallang na berkibat ni tongkoki sikolayya karena jai kajariang kaminjo”<sup>69</sup> menurut bapak Jamaluddin pengurusan wakaf itu sangat penting karena disetujui oleh semua pihak menurutnya beliau mengurus legalitas tanah wakafnya karena itu sangat dibutuhkan terutama dalam sektor pembangunan sekolah ditambah lagi mengantisipasi terjadinya sengketa dikemudian hari yang bisa saja mengakibatkan sekolah tersebut akan ditutup karena tidak adanya pegangan hukum atau legalitas tanah wakafnya.

Sedangkan hasil wawancara dari 9 informan lainnya menjadi sampel penelitian merka tidak pernah melakukan kepengurusan legalitas tanah wakaf. Sebagaimana yang di kemukakan oleh bapak Sakhrir S.Pd “tidak pernah melakukan pengurusan legalitas Tanah wakaf dikernakan kesibukan pribadi

---

<sup>69</sup> Jamaluddin, (32 Tahun), Kepala Sekolah Mdarasah Al-Maarif, Wawancara, Mampua, 11 Juni 2018.

sehingga tidak ada waktu untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf, di tambah lagi tidak tau tahu tentang tatacaranya.<sup>70</sup> Di pertegas lagi oleh bapak M. Syarif, S.Pd “tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf dikarenakan tidak adanya keinginan untuk melakukan itu menurutnya harusnya KUA sebagai pihak yang terkait haruslah menjemput bola karena hal tersebut bukanlah hal yang begitu penting.<sup>71</sup> Selanjutnya bapak H. Sanusi Tuppu mengatakan bahwa tidak pernah melakukan pengurusan tanah wakaf karena tidak tau tata cara pengurusannya, yang disebabkan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat, tambah lagi menurutnya sering terjadinya saling klaim tanah wakaf antar masyarakat yang membuat orang tidak melakukan pengurusan persertifikatan tanah wakaf miliknya ke KUA”<sup>72</sup>

Ketiga pendapat dari informan diatas, mewakili dari 6 informan lainnya yang tidak pernah melakukan praktek pengurusan legalitas tanah wakaf karena dipegaruhi oleh faktor pengetahuan dan pemahaman hukum, tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah yang terkait serta factor menyangkut urusan pribadi lainnya salah satunya karena adanya saling klaim kepemilikan dari tanah wakaf tersebut.

Dari keseluruhan oleh data kesadran hukum, dalam hal ini pengetahuan hukum, pemahaman hukum sikap hukum dan pola perilaku hukum masyarakat di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dalam pengurusan legalitas tanah wakaf maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan legalitas tanah wakaf di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

---

<sup>70</sup> Sakhrir (30 Tahun), Pewakaf, *Wawancara*, Bontobuddung, 06 Juni 2018.

<sup>71</sup> M. Syarif (44 Tahun), Pewakaf Dan Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Ulugalung, 21 Juni 2018.

<sup>72</sup> H. Sanusi Tuppu Tuppu (71 Tahun), Pewakaf Masjid Nurul Iman, *wawancara*, Tanete, 09 Juni 2018.

masih tergolong rendah karena terkait pengetahuan hukum tak seorangpun dari informan yang mengetahui tentang UU RI no 41 Tahun 2004 tentang perwakafan yang menjadi dasar hukum perwakafan di Indonesia, pemahaman hukum prima tanah wakaf hanya 2 orang informan yang dianggap faham tentang proses Pengurusan legalitas tanah wakaf sikap hukum Masyarakat hanya 4 orang mengatakan pengurusan legalitas tanah wakaf itu penting dan 6 orang lainnya pengurusan legalitas tanah wakaf itu hanya sebatas formalitas dan pola perilaku hukum masyarakat hanya 1 orang yang pernah melakukan pengurusan sertifikat sebagai legalitas tanah wakaf.. Sehingga berdasarkan data inilah dapat ditarik kesimpulan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Tompobulu masih tergolong rendah.

***C. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Masyarakat terhadap pengurusan legalitas Tanah wakaf di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa***

Masalah kesadaran hukum masyarakat tentu tidak lepas dari sebab atau factor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum tersebut. Karena berangkat dari factor tersebut kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sehingga berpengaruh kepada tingkat kesadaran hukum masyarakat pada suatu daerah tertentu, factor tersebut bisa saja bersal dari diri masyarakat itu secara individual, kebiasaan suatu kelompok masyarakat, atau bisa saja berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat pada suatu permasalahan tertentu khususnya pada pembahasan ini menyangkut pengurusan legalitas tanah wakaf. Masalah kesadaran hukum sangat penting untuk diperhatikan apalagi secara khusus dalam pengurusan masyarakat terhadap pengurusan legalitas tanah wakaf.

Berdasarkan oleh data wawancara dengan pihak penerima wakaf serta tokoh masyarakat terkait yang dianggap memahami masalah perwakafan yang ada di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (berdasarkan wawancara dari bulan

Juni 2018), diperoleh data yang memuat tentang gambaran factor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Terkait pengurusan legalitas Tanah wakafnya. Factor-faktornya adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Masyarakat**

Berdasarkan hasil olah data pihak penerima tanah wakaf di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa itu memiliki pengetahuan hukum dan kesadaran hukum yang rendah. Pihak pewakaf atau penerima wakaf selalu mengandalkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan tidak adanya inisiatif sendiri dari masyarakat untuk melakukan atau mencari informasi tentang pengurusan pengurusan legalitas tanah wakaf tersebut. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan bapak M.Syarif dg Sibali : “punna secara formalna harusna KUAPA turun untuk mendata Butta wakafka dalam artian pemarenta dalam hal ini KUA harus menjemput bola Istilahna jari punna nia tena ta data kaminjoberati KUA kurang sosialisasi karena rata-rata tawwa kurang pengetahuannya tawwa tentang prosedurnya jari malasaki anggrusu kaminjo punna la lansungja”<sup>73</sup> berdasarkan ada wawancara tersebut pemerintah terkait harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap tanah wakaf dan jika itu kurang maka berarti pemerintah terkait itu kurang melakukan sosialisasi karena menurut informan mengakui rata-rata orang itu tidak faham tentang prosedur perwakafan yang berlaku.

Jadi dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa factor pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat itu sangat berpengaruh karena masyarakat hanya mengandalkan fasilitas dan sosialisasi pemerintah tertentu dan tanpa melakukan inisiatif sendiri untuk melakukan pendaftaran

---

<sup>73</sup> M. Syarif (44 Tahun), Pewakaf Dan Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Uluglung, 21 Juni 2018.

atau mencari informasi tetenagn praktek perwakafan, sehingga factor pemahaman dan pengetahuan hukum tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pengurusan legalitas tanah wakafnya lebih khususnya di kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa.

## **2. Faktor Kurangnya Sosialisasi Hukum**

Sosialisasi hukum sangat berpengaruh terhadap pengurusan legalitas tanah wakaf di mana tanpa adanya sosialisasi, masyarakat tidak akan mengetahui dan memahami aturan atau Undang-undang tentang praktek perwakafan, serta tidak tau tentang tata cara perwakafan yang berlaku. Artinya pengetahuan hukum atau pemeahaman hukum masyarakat tergantung bagaimana sosialisasi itu berjalan.

Berdasarkan penjelasan Bapak Ismail B, S.Pd., M.Pd. “selama ini pemerintah yang terkait tidak pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang perwakafan, jadi pihak yang mewakafkan tanahnya tidak tau tentng manfaat pendaftaran tanah wakaf tersebut, sehingga orang akan menjadi tidak peduli terhadap masalah tersebut”<sup>74</sup> hal serupa juga disampaikan oleh bapak Makatang “menurutnya banyaknya banyaknya tanh wakaf yang tidak terdaftar dikarenakan tidak adanya sosialisasi antara pihak KUA dengan masyarakat, di tambah lagi masyarakat yang kurang perhatian dalam masalah itu sehingga masalah tersebut menjadi berlarut, nanti ada masalah baru di perhatikan masalah itu”<sup>75</sup>

Berdasarkan uraian tersebut factor kurangnya sosialisasi menajdi salah satu factor yang berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam hal pengurusan legalitas tanah wakafnya, karena masalah tersebut

---

<sup>74</sup> Ismail B (44 Tahun), Imam Desa Tanete, Wawancara, Batupewai Desa Tanete, 19 Juni 2018..

<sup>75</sup> Sakhrir (30 Tahun), Pewakaf, Wawancara, Bontobuddung, 06 Juni 2018.

berkaitan dengan masalah pemahaman masyarakat dan tidak adanya inisiatif dari masyarakat itu sendiri sehingga peran pemerintah dalam mensosialisasikan praktek perwakafan dan hukumnya bisa menjadi factor yang dapat menentukan tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

### **3. Waktu pengurusan sertifikat tanah wakaf**

Waktu pengurusan sampai jadinya sertifikat sebagai legalitas tanah wakaf merupakan factor yang cukup berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pengurusan legalitas tanah wakafnya, karena pembuatannya di anggap yang lama dan melalui proses yang di anggap berbelit sehingga masyarakat tidak terlalu peduli terhadap pengurusan tanah wakafnya. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Syakhrir, S.Pd. “waktu pembuatan sertifikat wakaf itu menyita waktu yang sangat lama mana lagi banyaknya urusan pribadi yang harus diselesaikan ditambah juga dengan proses perwakafan yang sangat berbelit-belit sehingga malas mendaftarkannya”

Jadi waktu pengurusan juga menjadi salah satu factor yang berpengaruh dalam melakukan pengurusan sertifikat terhadap legalitas tanah wakaf, karena menurut informan itu terkendala dengan urusan pribadi dan proses yang berbelit sehingga dapa memakan waktu yang cukup banyak jika ingin melakukan pendaftaran legalitas tanah wakaf miliknya.

### **4. Faktor prinsip saling percaya**

Kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa memang daerahnya termasuk daerah pedesaan, pada daerah tersebut system gotongroyong antar masyarakat itu masih terjalin kuat antara masyarakat. Hal ini tergambar pada saat akan melakukan pembangunan masjid, perkuburan dan fasilitas umum

lainnya masih memiliki prinsip saling percaya artinya tanah tersebut merupakan milik bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama. Hal ini dipertegas oleh bapak H. Sanusi Tuppu “bahwa tanah wakaf itu tak jarang diperoleh dari hasil patungan warga, jadi menurutnya pengurusan terkait legalitas tanah wakaf itu tidak lagi diperlukan karena tujuan dari persertifikatan itu menghindari sengketa dan kalau sudah ada prinsip saling percaya wakaf secara lisan saja itu sudah cukup karena tidak mungkin ada lagi yng menggugat”.<sup>76</sup>

Faktor-faktor terebut yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat sebagai legalitas tanah wakaf itu jelas sangat berpengaruh pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, karena banyaknya factor yang mempengaruhinya sehingga akan semakin rendah pula kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pengurusan legalitas tanah wakafnya.

---

<sup>76</sup> H. Sanusi Tuppu (71 Tahun), Pewakaf Masjid Nurul Iman, *wawancara*, Tanete, 09 Juni 2018.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas tanah wakaf yang ada di kecamatan Tompobulu berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa, yang berkaitan dengan pengetahuan hukum dari 10 informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini tak seorangpun yang mengetahui secara pasti tentang aturan-aturan dalam praktek perwakafan yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang perwakafan akan tetapi 1 dari informan telah melakukan praktek pengurusan wakaf tapi dia mengaku tidak mengetahui secara pasti tentang aturannya. Selain itu, masalah pemahaman hukum masyarakat berdasarkan olah wawancara dari 10 informan terkait masalah tatacara perwakafan hanya menunjukkan bahwa hanya 2 orang yang mengetahui tatacara perwakafan mulai dari saat ingin menyatakan ikrar wakaf sampai kepada persertifikatan tanah wakaf. Masalah sikap hukum masyarakat 6 orang informan menyatakan bahwa pengurusan legalitas tanah wakaf itu tidak penting dan menganggap hal tersebut hanyalah persoalan formalitas. Dan pola perilaku hukum masyarakat berdasarkan data dalam kurun waktu 2014-2016 hanya ada satu tanah wakaf yang terdaftar di kantor urusan agama yaitu hanya tanah wakaf pembangunan mandrasah tsanawiyah Al-maarif. Jadi berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas tanah wakaf di Kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa masih tergolong rendah.



2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan legalitas tanah wakaf di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yaitu: *pertama* Faktor pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, kecenderungan masyarakat untuk tidak berinisiatif sendiri menggali informasi dan hanya mengharap sosialisasi pemerintah menjadi salah satu factor rendahnya kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam hal praktek perwakafan. *kedua*, Faktor sosialisasi hukum, tidak adanya sosialisasi hukum menjadi factor pendukung lain karena masyarakat tidak faham dalam praktek perwakafan, *ketiga*, factor waktu pengurusan juga menjadi salah satu factor selain prosesnya yang berbelit-belit menurut masyarakat, lamanya waktu juga dapat berpengaruh karena terkendala urusan pribadi dan *terakhir* factor prinsip saling percaya tingginya sikap saling percaya antar masyarakat sehingga membuat masyarakat pengurusan wakaf itu hanya bersifat formalitas dan tertalalu penting karena adanya kepercayaan yang tinggi antar masyarakat untuk tidak menimbulkan persengketaan terhadap tanah wakaf tersebut.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan implikasi penelitian sebagai masukan atau saran kepada semua pihak untuk menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pengurusan legalitas tanah wakaf di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintah terkait dalam pengurusan legalitas tanah wakaf agar sebaiknya menalukakn penyuluhan dan sosialisasi secara mendalam karena meliha kesadaran hukum masyarakat di kecamatan Tompobulu masih tergolong rendah khususya masalah perwakafan dengan salah satu caranya yaitu memberdayakan setiap penyuluh agama setiap desa untuk

mensosialisasikan pentingnya legalitas tanah wakaf sebagai upaya menghindari sengketa.

2. Kepada masyarakat kecamatan Tompobulu agar lebih berinisiatif menggali informasi secara mendalam tentang praktek perwakafan, salah satu caranya dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang, sehingga di harapkan isi dari undang-undang No 41. Tahun 2004 tentang wakaf, dan aturan yang terkait perwakafan lainnya dapat di pahami dan di aplikasikan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum. Dan di harapkan untuk semua elemen masyarakat baik itu pemerintah, Tokoh Masyarakat, ataupun masyarakat di kecamatan Tompobulu agar kiranya membangun sinergitas antar masyarakat dengan cara saling memberikan informasi tetang masalah hukum yang ada di masyarakat khususnya dalam praktek perwakafan yang selama ini kurang di perhatikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Mikhraj Khazanah Ilmu.2013.
- Abdurrahman.*Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Indonesia*  
Bandung: Penerbit Alumni.1983.
- ad-Dimasyiqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung:Hasyimi, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*.Cet.VI; Palu:Sinar Grafika.2010.
- Ali, Achmad. *Mengembara di Belantara Hukum*. Cet I; Makassar:Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.1990.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watani Marpuang, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Badan Wakaf Indonesia. "Syarat Nazir". <http://bwikotamalang.com/syarat-nadzir> (17 April 2018)
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT. Gramedia.2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., Ed. ke-III; Cet.IV; Jakarta: BalaiPustaka, 2005.
- Efendi, Peragin. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.1991.
- El-Madani, Tim. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.2014.
- Hamid, Andi Tahir. *Pengadilan Agama & Bidangnya*. Cet.II;Jakarta:Sinar Grafika. 2005.
- Kurniati, *Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*.Makassar:Alauddin University Press. 2013.
- Lubis, Suhardi K. *wakaf & Pemberdayaan Umat*. Cet.II;Jakarta:Sinar Grafika.2010.
- Machmuddin, Dudu Muswara *Pengantar Ilmu Hukum*.Bandung:Rafika Aditama. 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta:Penerbit Lentera. 2011.
- Rozalinda.*Menajemen Wakaf Produktif*. Cet.II; Jakarta:Raja Grafindo.2016.
- Soekanto, Soerjono *Pakok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet.XXII; Jakarta: Rajawali Pers,2013

- Soekanto, Soerjono. dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi hukum dan Masyarakat* Jakarta: CV Rajawali.1980.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004
- Suroso dan Ngami. *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Milik*. Yogyakarta: Liberty. 1984.
- Syamsuddin, M. *Konstitusi Baru Budaya Hukum Hakim*, Edisi II Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2012.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media 2014.
- Tangkilisan, Hassel Nogi S. *Menajemen Publik*. Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2005.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Cet. Ke-II Jakarta: Sinar Grafika.2013.
- Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*. Cet.III; Jakarta: kencana.2010.
- Zein, Sartria Efendi M. *Ushul Fiqh*. Cet.V; Jakarta:Kencana.2014.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“URGENITAS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)”** bernama lengkap Munawir Nurum, Nim : 10100114076, merupakan Anak Tunggal dari pasangan Bapak H. Umar, S.Ag. dan Ibu Dra. Hj. Nurhayati yang lahir di Gowa, pada tanggal 01 November 1996.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar di SDN Ulugalung, pada tahun 2003-2008 Sampai Penulis menempuh pendidikan di MTs. YAPIT Malakaji di tahun 2008-2011 dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di MAN Malakaji tahun 2011-2014. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama hingga tahun 2018.

Selama menyandang status mahasiswa di jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum, penulis pernah menjadi Pengurus HMJ Peradilan Agama Periode 2014-2015, dan Aktif di pada Organisasi ekstra seperti di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan menjadi pengurus HMI Komisariat Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Serta tergabung dalam organisasi Daerah yaitu Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Gowa (HIPMA Gowa) koordinatrat Pallangga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 6579/S.01/PTSP/2018  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Gowa

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syarif'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3254/SH.01/PP.00.9/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUNAWIR NURUM**  
Nomor Pokok : 10100114076  
Program Studi : HAPK  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" URGENSI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KECAMATAN GOWA (STUDI KASUS TAHUN 2014-2018) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 29 Mei s/d 29 Juni 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN  
Makassar  
Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 21 Mei 2018.

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**A.M. YAMIN, SE, MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19810513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syarif'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringkat





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa - Gowa

Sungguminasa, 22 Mei 2018

Kepada

Nomor : 070/ 744 /BKB.P/2018

Yth. Camat Tompobulu

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Di-

Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 6579/S.01/PTSP/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Munawir Nurum**  
Tempat/Tanggal Lahir : Gowa, 1 November 1996  
Jenis kelamin : ~~Perempuan~~ / Laki-Laki  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Ulugalung, Desa Tanete Kec. Tompobulu

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**URGENSI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (STUDI KASUS TAHUN 2014-2018)**"

Selama : 29 Mei s/d 29 Juni 2018

Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

AN BUPATI GOWA  
KEPALA BADAN,  
  
**DRS. BAHARUDDIN.T**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
4. Yang bersangkutan;





# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA CAMAT TOMPOBULU

Jalan Masjid Raya Nomor 133 Malakaji Telepon (0419) 23100

## SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070/27 /KTB/VI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama                 | : ZULFIKAR                       |
| 2. Nip                  | : 19620326198412 1002            |
| 3. Pangkat / Gol. Ruang | : Penata Tk. I, III/d            |
| 4. Jabatan              | : Sekertaris Kecamatan Tompobulu |

Dengan ini menyatakan :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama                 | : MUNAWIR NURUM                          |
| 2. Tempat tanggal lahir | : Gowa 01 Napember 1996                  |
| 3. Jenis Kelamin        | : Laki-laki                              |
| 4. Pekerjaan /Lembaga   | : Mahasiswa SI                           |
| 5. Alamat               | : Jl.Ulugalung Desa Tanete Kee.Tompobulu |

Berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa

Nomor	: 070/714/BKB.P/2018
Tanggal	: 22 Mei 2018

Telah melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) Yang Berjudul **"URGENSI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA ( STUDI KASUS TAHUN 2014-2018 )"** Dari Tanggal 29 Mei s/d 29 Juni 2018

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Malakaji, 02 Juli 2018

ALAUDIN  
M A K A S S A R

  
ZULFIKAR  
Pangkat: Penata Tk. I  
Nip: 19620326198401 1002

### Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab.Gowa
2. Dekan Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
3. Yang Bersangkutan.
4. Arsip.

## DOKUMENTASI WAWANCARA



### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya legalitas tanah wakaf?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Masyarakat terhadap legalitas tanah wakaf?

### **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Antikamma injo gambaranna perwakafanga ri Timpobulu?
2. Tikamma tingka' kasadaranna Tau Timpobuluka ri passala' pandattarang butta wakafna?
3. Apakah ki issengi masalah aturang angatoroki injo wakafka?
4. Antikamma injo carana tawwa punna erokki andattaraki butta wakafka?
5. Tikamma menurutta apaka parallu injo ni urusu sertifikat butta wakafka?
6. Apakah le'baji ia ki dattara butta wakafna?
7. Apa injo saba'na na kurang tau andattaraki butta wakafna?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R



## INSTRUMENT PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jamaluddin  
Tempat / tanggal lahir : Manfua, 09. 04. 1986  
Pendidikan : S 1  
Pekerjaan : Honorer

Menerangkan bahwa,

Nama : Munawir Nurum  
Nim : 10100114076  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum/ Peradilan Agama

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "URGENITAS KESADARAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa,

Yang diwawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

  
(Jamaluddin.....)

## INSTRUMENT PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HANZAH, S.H.I  
Tempat / tanggal lahir : KAYUMALLE 07.03.1980  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Penyuluh Agama.

Menerangkan bahwa,

Nama : Munawir Nurum  
Nim : 10100114076  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum/Peradilan Agama

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "URGENITAS KESADARAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa,

Yang diwawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR  
(HANZAH, S.H.I.)

## INSTRUMENT PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdullah  
Tempat / tanggal lahir : Mamuju, 25 Desember 1972  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Tokoh masyarakat

Menerangkan bahwa,

Nama : Munawir Nurum  
Nim : 10100114076  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Peradilan Agama

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "URGENITAS KESADARAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa,

Yang diwawancara

*(Abdullah)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## INSTRUMENT PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HAMZAH, S.H.I  
Tempat / tanggal lahir : KAYUMALLE 07.03-1980  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Penyuluh Agama.

Menerangkan bahwa,

Nama : Munawir Nurum  
Nim : 10100114076  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum/ Peradilan Agama

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "URGENTAS KESADARAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Yang diwawancara

ALAUDDIN  
M A K A S S A R  
(HAMZAH, S.H.I)

## INSTRUMENT PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syarif  
Tempat / tanggal lahir : Uluwung, 21 Juni 1974  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Guru

Menerangkan bahwa,

Nama : Munawir Nurum  
Nim : 10100114076  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum/ Peradilan Agama

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "URGENITAS KESADARAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

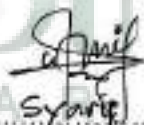
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Gowa,

Yang diwawancarai

ALAUDDIN

MAKASSARA

  
(Syarif.....)



## INSTRUMENT PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *SAKHRI R. S. Pd*  
Tempat / tanggal lahir : *BT. BUDDUNG 18-08-1988*  
Pendidikan : *S.I*  
Pekerjaan : *GURU SMA N 16 GOWA*

Menerangkan bahwa,

Nama : *Munawir Nurum*  
Nim : *10100114076*  
Perguruan Tinggi : *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*  
Fakultas / Jurusan : *Syariah dan Hukum/ Peradilan Agama*

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "URGENITAS KESADARAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Gowa,

Yang diwawancarai

*Sakhri R. S. Pd*  
(SAKHRI R. S. Pd.)

## INSTRUMENT PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MAKKATANG  
Tempat / tanggal lahir : PENCONG 31-12-1961  
Pendidikan : PGAN  
Pekerjaan : GURU MAN GOWA

Menerangkan bahwa,

Nama : Munawir Nurum  
Nim : 10100114076  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Peradilan Agama

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "URGENITAS KESADARAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

GOWA

Yang diwawancara

ALAUDDIN  
MAKASSAR

  
(MAKKATANG...)

## INSTRUMENT PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ISMAIL B, M.Pd  
Tempat / tanggal lahir : BONTOBUDUNG, 31/12/1979  
Pendidikan : S.2  
Pekerjaan : PNS/GURU

Menerangkan bahwa,

Nama : Munawir Nurum  
Nim : 10100114076  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum/ Peradilan Agama

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "URGENTAS KESADARAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Gowa,

Yang diwawancara

ISMAIL B, M.Pd.  
(.....)

## INSTRUMENT PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Abd Sid  
Tempat / tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan : Wirausaha / Masyarakat

Menerangkan bahwa,

Nama : Munawir Nurum  
Nim : 10100114076  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Peradilan Agama

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "URGENITAS KESADARAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Gowa,

Yang diwawancara

ALAUDDIN  
MAKASSAR



## INSTRUMENT PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MOH. SANUSI T.  
Tempat / tanggal lahir : TANETE 7H 1947  
Pendidikan : SAJANA-HUDA  
Pekerjaan : PESIUNTAH

Menerangkan bahwa,

Nama : Munawir Nuram  
Nim : 10100114076  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum/ Peradilan Agama

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "URGENITAS KESADARAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Gowa,

Yang diwawancara

ALA UDDIN  
MAKASSARA

(MOH. SANUSI T.)



**DATA WAKAF**  
**DATA BIMAS ISLAM DALAM ANGKA 2017**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TOMPOBULU**

No	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan	Jumlah		Sertifikasi	Belum Sertifikasi	Status Belum Sertifikat				Jumlah PPAIW	Nazhir		Tempat Ibadah	Sekolah/ Madrasa	Ponpes	Usaha	Makam	Panti n-	
		Lokasi	Luas(m <sup>2</sup> )			Belum AIW	Proses	AIW	BPN		Perorangan	Yayasan							
	KUA Kec. MALILI	95	57631	95	0	0	0	0	0	0	0	95	62	7	1	0	6	0	19
195																			
1	KELURAHAN MALAKAJI	24	6921	24	0	0	0	0	0	0	0	24	19	0	0	0	0	0	5
2	KELURAHAN CIKORO	2	996	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
3	DESA BONTOBUDDU	8	4904	8	0	0	0	0	0	0	0	8	3	2	0	0	0	0	3
4	DESA DATARA	17	27446	17	0	0	0	0	0	0	0	17	7	2	1	0	4	0	3
5	DESA GARING	10	4771	10	0	0	0	0	0	0	0	10	7	2	0	0	0	0	1
6	DESA RAPPOLEMBE	15	3822	15	0	0	0	0	0	0	0	15	9	0	0	0	1	0	5
7	DESA	5	2133	5	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	1
8	DESA TANETE	14	6638	14	0	0	0	0	0	0	0	14	12	0	0	0	1	0	1

**DAFTAR WAKAF KECAMATAN**

NO	NAMA WAKIF	NAZHIR		STATUS TANAH WAKAF	STATUS US BELUM	NOMOR SERTIFIKAT BPN	TANGGAL SERTIFIKAT	PERUNTUKAN SESUAI AIW	NOMOR AKTA IKRAR WAKAF	TANGGAL IKRAR WAKAF	TANAH WAKAF		
		NAMA	JENIS								DESA	ALAMAT	LUAS TANAH (M2)
1	M. ILYAS	H. ABD. MAJID T	Yayasan	Sertifikat		300/1519/1991	28-12-1991	Tempat Ibadah			KELURAHAN MALAKAJI		632
2	SUKKU	H. ABD. MAJID T	Yayasan	Sertifikat		157/1993	23-3-1993	Lain-Lain			KELURAHAN MALAKAJI		275

# URGENITAS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014- 2018)

## ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.uksw.edu</b> Internet Source	<b>11%</b>
<b>2</b>	<b>eprints.ums.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>positori.uin-alaud.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>digilib.unila.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>diyanshintaweecaihadiansyah.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>www.slideshare.net</b> Internet Source	<b>1%</b>